



PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 2025

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tujuan utama profil perkembangan kependudukan adalah menyajikan data dan informasi akurat mengenai kuantitas, kualitas, serta mobilitas penduduk untuk perencanaan pembangunan



Samsul Rizal
Bupati Hulu Sungai Tengah

Gusti Rosyadi Elmi
Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan buku ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Profil Perkembangan Kependudukan ini disusun dengan menyajikan data statistik kependudukan yang bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025, yang berasal dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Data yang disediakan oleh SIK telah dikonsolidasikan secara nasional dan telah melalui proses pembersihan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga dapat dipastikan keabsahan dan keandalannya.

Publikasi Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh instansi/lembaga pengguna untuk berbagai keperluan, antara lain pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, pencegahan kriminalitas, serta untuk keperluan strategis lainnya. Data kependudukan yang valid, akurat, dan terkini sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menyusun kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), merancang program pembangunan yang tepat sasaran, serta dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat daerah. Pengelolaan data kependudukan yang optimal juga menjadi pondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya Visi Bupati saat ini "Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Religius, Sejahtera dan Bermartabat".

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, maka kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran untuk perbaikan penyusunan pada waktu yang akan datang.

Barabai, April 2026
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



HERRY SETTAWAN, S.Sos, M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP.19780328 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Pengertian umum	3
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	5
2.1 Letak Geografis Daerah	5
2.2 Kondisi Demografis Daerah	6
2.3 Gambaran Ekonomi Daerah	7
2.4 Potensi Daerah	8
BAB III SUMBER DATA	11
BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	13
4.1 Kuantitas Penduduk	13
4.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk	13
4.1.1.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Jenis Kelamin	13
4.1.1.2 Kepadatan Penduduk	14
4.1.1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk	15
4.1.2 Penduduk menurut Karakteristik Demografi	16
4.1.2.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Usia dan Jenis Kelamin	16
4.1.2.1.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur	16
4.1.2.1.2 Penduduk Usia Median	17

4.1.2.1.3	Rasio Jenis Kelamin	18
4.1.2.1.4	Piramida Penduduk.....	19
4.1.2.1.5	Rasio Ketergantungan.....	21
4.1.2.2	Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Status Perkawinan.....	21
4.1.2.2.1	Angka Perkawinan Kasar	23
4.1.2.2.2	Angka Perkawinan Umum	23
4.1.2.2.3	Rata-rata Umur Kawin Pertama (SMAM)	24
4.1.2.2.4	Angka Perceraian Kasar	25
4.1.2.2.5	Angka Perceraian Umum	26
4.1.2.3	Keluarga	27
4.1.2.3.1	Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga.....	27
4.1.2.3.2	Hubungan dengan Kepala Keluarga	28
4.1.2.3.3	Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Umur	29
4.1.2.3.4	Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Perkawinan.....	30
4.1.2.3.5	Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan	31
4.1.2.3.6	Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan	32
4.1.2.4	Penduduk menurut Karakteristik Sosial	33
4.1.2.4.1	Jumlah Penduduk menurut Pendidikan.....	33
4.1.2.4.2	Jumlah Penduduk menurut Agama	34
4.1.2.4.3	Jumlah Penduduk menurut Jenis Disabilitas	36
4.1.2.5	Kelahiran	37
4.1.2.5.1	Angka Kelahiran Kasar (CRB)	37
4.1.2.5.2	Angka Kelahiran Umum (GFR).....	38
4.1.2.6	Kematian	39
4.1.2.6.1	Angka Kematian Kasar	40

4.2	Kualitas Penduduk	41
4.2.1	Kesehatan.....	41
4.2.1.1	Angka Kematian Bayi (IMR/AKB)	41
4.2.1.2	Angka Kematian Neonatal (NNDR).....	42
4.2.1.3	Angka Kematian Anak.....	43
4.2.1.4	Angka Kematian Ibu	44
4.2.2	Pendidikan	45
4.2.2.1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	46
4.2.2.2	Angka Partisipasi Murni (APM).....	47
4.2.2.3	Angka Putus Sekolah	47
4.2.3	Ketenagakerjaan	48
4.2.3.1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)	48
4.2.4	Sosial.....	50
4.2.4.1	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	50
4.2.4.2	Proporsi Penyandang Disabilitas	51
4.3	Mobilitas Penduduk.....	52
4.3.1	Migrasi Masuk	52
4.3.2	Migrasi Keluar	53
4.3.3	Migrasi Netto.....	54
4.3.4	Persentase Penduduk Kota.....	55
4.3.5	Rasio Penduduk Kota dan Desa	56
BAB V KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN		57
5.1	Kepemilikan Kartu Keluarga	57
5.2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el).....	58
5.3	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	59

5.4	Kepemilikan Akta Kelahiran	60
5.5	Kepemilikan Akta Perkawinan	61
5.6	Kepemilikan Akta Perceraian	62
5.7	Kepemilikan Akta Kematian	63
5.8	Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	64
BAB VI PENUTUP		66
DAFTAR PUSTAKA.....		68

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kecamatan	6
Tabel 2-2	Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah.....	6
Tabel 4-1	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin.....	14
Tabel 4-2	Kepadatan Penduduk	15
Tabel 4-3	Laju Pertumbuhan Penduduk	16
Tabel 4-4	Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	17
Tabel 4-5	Penduduk Usia Median menurut kelompok umur	18
Tabel 4-6	Jumlah Penduduk dan Umur Median	18
Tabel 4-7	Rasio Jenis Kelamin	19
Tabel 4-8	Rasio Ketergantungan.....	21
Tabel 4-9	Jumlah penduduk menurut Status Perkawinan	22
Tabel 4-10	Angka Perkawinan Kasar.....	23
Tabel 4-11	Angka Perkawinan Umum	23
Tabel 4-12	Jumlah Penduduk per Usia yang Belum Kawin	24
Tabel 4-13	Rata-rata Umur Kawin Pertama	25
Tabel 4-14	Angka Perceraian Kasar	26
Tabel 4-15	Angka Perceraian Umum.....	26
Tabel 4-16	Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga.....	28
Tabel 4-17	Hubungan dengan Kepala Keluarga	28
Tabel 4-18	Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin	29
Tabel 4-19	Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Perkawinan.....	30
Tabel 4-20	Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan	31
Tabel 4-21	Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan	32
Tabel 4-22	Jumlah Penduduk menurut Pendidikan.....	34

Tabel 4-23 Jumlah Penduduk menurut Agama dan Kepercayaan	35
Tabel 4-24 Jumlah Penduduk menurut Jenis Disabilitas	36
Tabel 4-25 Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR).....	38
Tabel 4-26 Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate/GFR).....	39
Tabel 4-27 Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate / CDR)	40
Tabel 4-28 Angka Kematian Bayi (IMR/AKB)	42
Tabel 4-29 Angka Kematian Neonatal (NNDR).....	43
Tabel 4-30 Angka Kematian Anak.....	44
Tabel 4-31 Angka Kematian Ibu	45
Tabel 4-32 Usia Standar disetiap Jenjang Pendidikan.....	46
Tabel 4-33 Angka Partisipasi Kasar (APK)	46
Tabel 4-34 Angka Partisipasi Murni (APM).....	47
Tabel 4-35 Angka Putus Sekolah (APS).....	48
Tabel 4-36 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)	49
Tabel 4-37 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	50
Tabel 4-38 Proporsi Penduduk Penyandang Disabilitas.....	52
Tabel 4-39 Migrasi Masuk	53
Tabel 4-40 Migrasi Keluar	54
Tabel 4-41 Migrasi Netto.....	55
Tabel 4-42 Jumlah Penduduk Kota	56
Tabel 4-43 Rasio Penduduk Kota dan Desa	56
Tabel 5-1 Kepemilikan Kartu Keluarga	58
Tabel 5-2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.....	59
Tabel 5-3 Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	60
Tabel 5-4 Kepemilikan Akta Kelahiran	61

Tabel 5-5	Kepemilikan Akta Perkawinan.....	62
Tabel 5-6	Kepemilikan Akta Perceraian	63
Tabel 5-7	Kepemilikan Akta Kematian	63
Tabel 5-8	Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Jumlah Penduduk Semester II 2024 dan Semester II 2025.....	7
Gambar 4-1 Piramida Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2025	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Data dan informasi tersebut wajib digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan (Pasal 49).

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan (Pasal 83). Pentingnya penyajian data perkembangan kependudukan tersebut kemudian diperkuat dalam pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa "Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan seperti pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal". Hal tersebut yang mendasari pentingnya penyajian data perkembangan kependudukan dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Penduduk juga memiliki hak dan kewajiban dalam perkembangan kependudukan. Penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Di samping itu penduduk juga mempunyai kewajiban untuk memberikan data dan informasi berbagai hal yang menyangkut diri dan keluarganya termasuk mutasi yang terjadi sesuai yang diminta oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai data kependudukan ini perlu disusun Profil Perkembangan Kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dibuat untuk memberikan gambaran kondisi kependudukan di daerah, serta prospek kependudukan di masa yang akan datang. Di sisi lain penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini merupakan wujud pemanfaatan data kependudukan yang tersebar diberbagai instansi. Profil Perkembangan Kependudukan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta prediksi prospek kependudukan dimasa yang akan datang.

1.2 Tujuan

Menyajikan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 yang *up to date* dan akurat sebagai salah satu informasi yang digunakan sebagai perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan mendukung perencanaan pelayanan publik dan sektor lainnya serta untuk mengetahui keadaan dan persebaran penduduk dari waktu ke waktu, agar penyebarannya serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

1.3 Ruang lingkup

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025, adalah

- a. Kuantitas Penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk;
- b. Kualitas Penduduk, meliputi kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan sosial;

- c. Mobilitas penduduk, meliputi migrasi masuk, migrasi keluar, migrasi netto, persentase penduduk kota dan rasio penduduk kota dan desa.
- d. Kepemilikan dokumen Kependudukan.

1.4 Pengertian Umum

Beberapa istilah pengertian umum yang digunakan dalam penulisan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 adalah diantaranya :

- a. *Penduduk* adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
- b. *Kependudukan* adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
- c. *Administrasi Kependudukan* adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
- d. *Perkembangan Kependudukan* adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
- e. *Data Kependudukan* adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
- f. *Profil Perkembangan Kependudukan* adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010);
- g. *Persebaran penduduk* adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan;
- h. *Penyebaran penduduk* adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- i. *Luas daerah* (wilayah) adalah luas suatu daerah baik yang dihuni penduduk maupun yang tidak dihuni;
- j. *Rasio jenis kelamin* adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita;
- k. *Rasio Ketergantungan* adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja);
- l. *Angkatan kerja* adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas secara ekonomi potensial menghasilkan barang dan jasa (komoditas). Terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk pencari kerja;
- m. *Angka Partisipasi Angkatan Kerja* adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
- n. *Laju pertumbuhan penduduk* adalah rata-rata tahunan laju perubahan jumlah penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu;
- o. *Piramida penduduk* adalah grafik berbentuk piramida yang merupakan gambaran secara visual dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin;
- p. *Pemanfaatan Data Kependudukan* adalah pemanfaatan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan satu- satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan seperti: pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Letak Geografis Daerah

Secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 2°33'16.650"-2°36'5.032" Lintang Selatan dan 115°9'17.003"-115°49'10.478" Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, daerah hulu sungai yang umumnya disebut "Banua Anam". Kabupaten ini memiliki jarak sepanjang 150 km dari Kota Banjarbaru yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Balangan
- Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru
- Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dengan letak geografis dan batas wilayah tersebut, maka posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat strategis dan berada di tengah perlintasan kawasan hulu sungai dan jalur lintas antar provinsi. Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki wilayah seluas 1.573,41 km². Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Selatan cukup kecil yaitu hanya sebesar 3,92% dari total wilayah provinsi. Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Kecamatan Barabai dimana hanya memiliki luas wilayah 41,98 km². Meskipun begitu, jumlah wilayah administrasi desa/kelurahan di Kecamatan Barabai mencapai 6 kelurahan dan terdapat 12 wilayah yang statusnya desa. Jika dilihat secara agregat, jumlah keseluruhan kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 11 kecamatan dengan wilayah administratif terkecil sebanyak 169 dengan rincian sebanyak 8 kelurahan dan 161 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Batang Alai Timur dengan wilayah seluas 565,24 km² atau mencapai 35,92% dari total luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun pembagian wilayah administratif kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2-1 Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

NO	KECAMATAN	LUAS (Km ²)	%	KELURAHAN	DESA	RW	RT
1	HARUYAN	104,81	6,66	-	17	51	103
2	BATU BENAWA	58,16	3,70	-	14	41	80
3	LABUAN AMAS SELATAN	90,4	5,75	1	17	51	91
4	LABUAN AMAS UTARA	166,22	10,56	-	16	40	102
5	PANDAWAN	105,37	6,70	-	21	60	127
6	BARABAI	41,98	2,67	6	12	30	90
7	BATANG ALAI SELATAN	80,51	5,12	1	18	51	90
8	BATANG ALAI UTARA	71,52	4,55	-	14	42	82
9	HANTAKAN	227,57	14,46	-	12	36	60
10	BATANG ALAI TIMUR	565,24	35,92	-	11	33	57
11	LIMPASU	61,63	3,92	-	9	27	47
HULU SUNGAI TENGAH		1.573,41	100	8	161	462	929

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. HST.

2.2 Kondisi Demografis Daerah

Kondisi jumlah penduduk menurut wilayah dapat memberikan gambaran tingkat kemajuan suatu wilayah. Suatu daerah yang memiliki daya tarik, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pendidikan, menjadi tujuan bagi para penduduk untuk migrasi ke wilayah tersebut, baik penduduk dari kabupaten lain maupun luar provinsi. Jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan data kependudukan bersih semester II tahun 2025 yaitu 272.954 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 137.510 jiwa dan perempuan sebesar 135.444 jiwa. Sedangkan pada semester II tahun 2024 jumlahnya yaitu 271.505 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 136.840 jiwa dan perempuan sebesar 134.665 jiwa. Hal ini berarti penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan sebesar 1.449 jiwa atau 0,53 %.

Tabel 2-2 Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 dan 2025

WILAYAH	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
HULU SUNGAI TENGAH	136.840	137.510	134.665	135.444	271.505	272.954

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2024 dan semester II 2025.

Gambar 2-1 Jumlah Penduduk Semester II 2024 dan Semester II 2025



Sumber : Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri Semester II 2024 dan Semester II 2025

2.3 Gambaran Ekonomi Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah merupakan salah satu kabupaten dari enam (6) kabupaten yang ada di wilayah pengembangan pembangunan I Kalimantan Selatan atau yang lebih populer disebut Banua Anam. Luas wilayah HST seluas 1.573,41 Km² dan berpenduduk 272.954 jiwa pada tahun 2025, secara geografis terletak di tengah-tengah wilayah pengembangan pembangunan I Kalimantan Selatan, lebih dari itu Kota Barabai sebagai ibu kota kabupaten mempunyai posisi strategis sebagai kota transit lintas Kalimantan poros utara yang menghubungkan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Dampak langsung dari ketimpangan ini adalah terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketimpangan pembangunan antar wilayah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun formulasi kebijakan pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan

peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan kerja, pendidikan, maupun berbagai modal lainnya.

Pengembangan dan pembangunan basis ekonomi seperti sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan yang banyak menjadi lapangan usaha masyarakat perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah. Ekonomi kerakyatan perlu dikembangkan sebagai konsep dasar yang menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bertitik tolak pada sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Pengembangan dan pembangunan sektor-sektor tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian rakyat serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar wilayah.

Selain peningkatan lapangan usaha basis ekonomi daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu juga didorong pengembangan dan peningkatan sektor-sektor non basis ekonomi potensial seperti ekonomi kreatif dan pariwisata. Dengan pengembangan sektor-sektor potensial ekonomi diharapkan lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja, investasi dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Berada di tengah–tengah wilayah Banua Anam, Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan daerah yang sangat strategis untuk sektor perdagangan. hal tersebut terlihat dari keramaian pasar keramat Barabai yang buka 24 jam.

2.4 Potensi Daerah

Secara topografi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 3 (tiga) wilayah, yaitu: kawasan rawa, dataran rendah dan wilayah pegunungan meratus. Semuanya berada pada ketinggian antara terendah (-6) – 7m seluas 24.586,15 ha, >7 - 25m seluas 30.839,69 ha, >25-100m seluas 22.251,72 ha, >100 - 500m seluas 49.030,5 ha, >500 -1.000m seluas 41.216,73 ha dan tertinggi >1.000m

seluas 9.152,63 ha, berada di gunung halau – halau/ gunung besar pegunungan meratus \pm 1.851m di atas permukaan laut. Kemiringan tanah bervariasi yaitu terendah 0 – 2 % seluas 132.517,72 ha, >2 – 15 % seluas 20.168,37 ha, >15 – 40 % seluas 21.336,86 ha dan >40 % seluas 3.054,46 ha.

Untuk topografi rawa yang tersebar berada di Kecamatan Batang Alai Utara, Pandawan, Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan dan Haruyan, dimana budidaya yang dilaksanakan mayoritas hanya dimusim kemarau dengan komoditas padi dan hortikultura. Kawasan rawa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga dijadikan sebagai lumbung ikan dan tempat budidaya kerbau. Pada dataran rendah, budidaya dapat dilakukan sepanjang tahun, dengan komoditas pertanian yang lebih luas dan beragam yaitu padi dan hortikultura, perikanan serta peternakan. Kawasan dataran rendah lebih potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya, mengingat keunggulan dan kemudahan penangannya dibandingkan kawasan rawa dan pegunungan. Dari dataran rendah inilah, dihasilkan komoditas padi, sayur mayur, ternak besar dan kecil, perikanan budidaya karamba dan kolam, perkebunan karet, kelapa serta tanaman lainnya.

Secara hidrologi, ada 3 wilayah aliran sungai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sungai Batang Alai, sungai Barabai dan sungai Haruyan dan satu saluran (kanal) pengendali banjir yang membentang dari Kecamatan Batu Benawa ke Rawa Bangkau. Disamping itu ada 1 bendung yaitu Bendung Batang Alai dan 3 daerah irigasi kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu DI Intangan di Kecamatan Batang Alai Selatan, DI Haruyan dan DI Mangunang di Kecamatan Haruyan. Sedang DI kewenangan Kabupaten adalah DI Baruh di Kecamatan Limpasu, DI Kahakan di Kecamatan Batu Benawa dan DI Telang di Kecamatan Batang Alai Utara. Untuk pemanfaatan sumber air dengan debit di atas 100 liter / detik meliputi sumber mata air sungai Batang Alai dan sungai Barabai.

Secara klimatologi, jumlah curah hujan tahunan rata-rata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebanyak 175 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata sebanyak 140 hari/tahun dan intensitas suhu antara 21,04°C sampai dengan 37,02° C.

Berdasarkan penggunaan lahan, terbagi atas 2 kawasan yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan lindung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupa hutan lindung adalah seluas ± 60.622 ha yang meliputi di Kecamatan Batang Alai Timur, Hantakan, Haruyan dan Batang Alai Selatan; kawasan lindung berupa kawasan resapan air seluas 656 ha di Kecamatan Labuan Amas Utara; kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan sungai seluas 22.033 ha, kawasan sekitar mata air dan kawasan RTH; dan kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana berupa rawan tanah longsor, banjir dan kebakaran. Kawasan rawan tanah longsor seluas 1.500 ha meliputi wilayah pegunungan di Kecamatan Batang Alai Timur, Hantakan dan Haruyan. Kawasan rawan banjir seluas 29.930 ha khususnya pada kawasan sekitar aliran sungai Batang Alai, Barabai dan Haruyan.

Penggunaan kawasan lahan untuk budidaya terbagi atas kawasan hutan produksi tetap seluas 8.599 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas 13.709 ha, kawasan budidaya pertanian seluas 34.994 ha, lahan pekarangan untuk bangunan seluas 6.413 ha, tegalan 13.372 ha, ladang seluas 12.015 ha, padang rumput seluas 1.075 ha, rawa yang tidak ditanami seluas 1.288 ha, kolam 108 ha, perkebunan 25.020 ha.

BAB III

SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan dalam laporan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu sumber data hasil registrasi, sumber data non-registrasi dan sumber data lintas sektor. Periode data yang digunakan adalah 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan unit analisisnya adalah kecamatan.

1. Data Registrasi

Sumber data hasil registrasi penduduk merupakan sumber data yang berasal dari sistem registrasi yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Data hasil registrasi meliputi komponen data penduduk yang dinamis yaitu pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal dan perubahan pekerjaan. Komponen-komponen ini dapat berubah kapan saja sehingga diperlukan registrasi penduduk yang dapat berubah setiap saat. Kelebihan penggunaan data hasil registrasi penduduk ini diantaranya adalah datanya relatif lengkap manakala setiap penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mau mendaftarkan diri, akurasi datanya sangat baik apabila semua data dapat dilaporkan, dan sifat datanya terus menerus atau real time. Adapun kekurangan dari sumber data hasil registrasi adalah datanya bersifat de jure, informasi yang disajikan relatif sedikit, kelengkapan data sangat tergantung pada kesadaran penduduk untuk melaporkan, dan kecermatan data sangat bergantung pada kontinuitas pencatatan dan sistem.

2. Data Non Registrasi.

Sumber data yang berasal dari hasil non-registrasi mengacu pada metode pengumpulan data yang tidak bergantung pada pencatatan administratif langsung dari individu. Pendekatan ini sering kali dilakukan melalui survei sampel, sensus penduduk, atau metode statistik lainnya yang bertujuan untuk melengkapi data registrasi kependudukan. Meskipun tidak memberikan data individu secara real-time,

pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai karakteristik demografi, sosial, dan ekonomi suatu wilayah. Data non-registrasi sering digunakan untuk menganalisis tren populasi, distribusi penduduk, serta kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.

3. Data Lintas Sektor

Data dari lintas sektor mencakup informasi yang diperoleh dari lembaga kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial dan sektor lainnya yang secara langsung atau tidak langsung mencatat informasi penduduk. Misalnya, data siswa yang terdaftar di sekolah dapat memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi pendidikan, sedangkan data pasien di fasilitas kesehatan membantu dalam pemantauan kondisi kesehatan masyarakat. Integrasi data dari berbagai sektor ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih akurat dalam perencanaan kebijakan, alokasi anggaran, serta peningkatan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Adapun data lintas sektor yang digunakan dari :

- a. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- d. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB IV

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

4.1 Kuantitas Penduduk

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.

4.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk

Untuk melihat jumlah dan sebaran penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada baiknya dibahas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebaran penduduk dapat dilihat dari proporsi penduduk, kepadatan penduduk dalam suatu daerah, dan laju pertumbuhan penduduk. Data dibawah ini menjadi acuan dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4.1.1.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Jenis Kelamin

Jumlah dan Proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk melihat berapa banyak jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Tujuannya adalah untuk menyediakan berbagai sarana dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan kebutuhan jenis kelamin dari penduduk yang ada. Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari data jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Tabel 4-1, di mana data semester II Tahun 2024 sebesar 271.505 jiwa dan data semester II Tahun 2025 sebesar 272.954 jiwa. Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami penambahan jumlah penduduk sebesar 1.449 jiwa dari tahun sebelumnya. Pada semester II Tahun 2024, jumlah penduduk sebesar 271.505 jiwa dengan laki-laki berjumlah 136.840 jiwa dan perempuan berjumlah 134.665 jiwa. Pada tahun selanjutnya yaitu semester II Tahun 2025, jumlah penduduk

sebesar 272.954 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 137.510 jiwa dan perempuan sebesar 135.444 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin mengalami peningkatan sebesar 670 jiwa untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebesar 779 jiwa untuk jenis kelamin perempuan.

Tabel 4-1 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin 2024 dan 2025

NO	KECAMATAN	LAKI – LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	HARUYAN	11.447	11.510	11.129	11.154	22.576	22.664
2	BATU BENAWA	10.495	10.508	10.363	10.390	20.858	20.898
3	LABUAN AMAS SELATAN	15.323	15.384	15.257	15.382	30.580	30.766
4	LABUAN AMAS UTARA	14.585	14.752	14.446	14.555	29.031	29.307
5	PANDAWAN	18.351	18.417	17.820	17.876	36.171	36.293
6	BARABAI	27.992	28.193	28.217	28.369	56.209	56.562
7	BATANG ALAI SELATAN	12.319	12.333	12.313	12.423	24.632	24.756
8	BATANG ALAI UTARA	9.771	9.797	9.539	9.619	19.310	19.416
9	HANTAKAN	6.868	6.894	6.380	6.433	13.248	13.327
10	BATANG ALAI TIMUR	3.860	3.891	3.646	3.635	7.506	7.526
11	LIMPASU	5.829	5.831	5.555	5.608	11.384	11.439
HULU SUNGAI TENGAH		136.840	137.510	134.665	135.444	271.505	272.954

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2024 dan semester II 2025.

4.1.1.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun, karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah, baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Perubahan dalam kepadatan penduduk terjadi karena perubahan jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah, baik disebabkan karena kelahiran, kematian, atau migrasi dari dan ke wilayah tersebut. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan. Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Semakin tinggi kepadatan penduduk, semakin penting untuk menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang memadai untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan tata kelola lingkungan. Pada Tabel 4-2 dibawah Jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 sebesar 272.954 jiwa dengan luas wilayah 1.573,41 km². Maka didapat kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 adalah 173 jiwa/km². Dari tabel 4-2 di bawah kecamatan yang memiliki kepadatan paling rendah adalah Kecamatan

Batang Alai Timur sebesar 13 jiwa/km² dan yang paling padat adalah Kecamatan Barabai sebesar 1.347 jiwa/km².

Tabel 4-2 Kepadatan Penduduk

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH (km ²)	KEPADATAN (jiwa/ km ²)
1	HARUYAN	22.664	104,81	216
2	BATU BENAWA	20.898	58,16	359
3	LABUAN AMAS SELATAN	30.766	90,40	340
4	LABUAN AMAS UTARA	29.307	166,22	176
5	PANDAWAN	36.293	105,37	344
6	BARABAI	56.562	41,98	1.347
7	BATANG ALAI SELATAN	24.756	80,51	307
8	BATANG ALAI UTARA	19.416	71,52	271
9	HANTAKAN	13.327	227,57	59
10	BATANG ALAI TIMUR	7.526	565,24	13
11	LIMPASU	11.439	61,63	186
HULU SUNGAI TENGAH		272.954	1.573,41	173

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025, diolah

4.1.1.3 Laju Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk disuatu wilayah. Dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan perpindahan (migrasi). Secara terus menerus jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi disisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu, migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah penduduk, dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (masuk/in migration dan keluar/out migration). Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (reproductive change) atau pertumbuhan alamiah (natural growth), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto (net migration).

Laju pertumbuhan penduduk memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi ekonomi sebuah wilayah. Pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi, bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam

perekonomian. Sebagai dampak dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah. Adanya spesialisasi dan pembagian kerja diantara para tenaga kerja akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi.

Berdasarkan tabel 4-3 di bawah ini, jumlah penduduk pada Tahun 2024 sebesar 271.505 jiwa dan jumlah penduduk pada Tahun 2025 sebesar 272.954 jiwa, maka pertambahan penduduk sebesar 1.449 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu 0,53%.

Tabel 4-3 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2024	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2025	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
1	HARUYAN	22.576	22.664	0,39
2	BATU BENAWA	20.858	20.898	0,19
3	LABUAN AMAS SELATAN	30.580	30.766	0,61
4	LABUAN AMAS UTARA	29.031	29.307	0,95
5	PANDAWAN	36.171	36.293	0,34
6	BARABAI	56.209	56.562	0,63
7	BATANG ALAI SELATAN	24.632	24.756	0,50
8	BATANG ALAI UTARA	19.310	19.416	0,55
9	HANTAKAN	13.248	13.327	0,60
10	BATANG ALAI TIMUR	7.506	7.526	0,27
11	LIMPASU	11.384	11.439	0,48
HULU SUNGAI TENGAH		271.505	272.954	0,53

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025, diolah.

4.1.2 Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

4.1.2.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Usia dan Jenis Kelamin

4.1.2.1.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk, disesuaikan dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing. Kebutuhan yang berkaitan dengan umur dan jenis kelamin mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sebagainya. Dalam bidang kesehatan, setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan

perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia. Sedangkan kelompok penduduk usia lanjut, membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih intensif.

Tabel 4-4 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-4	8.915	8.306	17.221
2	5-9	10.830	10.251	21.081
3	10-14	11.440	10.658	22.098
4	15-19	11.387	10.844	22.231
5	20-24	11.944	10.817	22.761
6	25-29	11.041	9.737	20.778
7	30-34	10.413	9.388	19.801
8	35-39	10.209	9.707	19.916
9	40-44	9.484	9.164	18.648
10	45-49	9.498	9.696	19.194
11	50-54	8.986	9.477	18.463
12	55-59	8.074	8.702	16.776
13	60-64	6.339	6.757	13.096
14	65-69	4.440	5.239	9.679
15	70-74	2.320	2.675	4.995
16	75 Keatas	2.190	4.026	6.216
TOTAL		137.510	135.444	272.954

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025

4.1.2.1.2 Penduduk Usia Median

Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Berdasarkan umur median ini, penduduk disuatu daerah dikategorikan :

- Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun
- Penduduk intermediate, jika umur median antara 20-30 tahun
- Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30.

Dari tabel 4-6 dibawah bahwa umur median penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Tahun 2025 adalah 33 tahun, yang berarti bahwa setengah dari penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 berusia di bawah 33 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 33 tahun. Umur median ini

terletak diantara 30-40 tahun, sehingga penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikategorikan sebagai penduduk tua.

Tabel 4-5 Penduduk Usia Median menurut kelompok umur

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK	KUMULATIF (fx)	% KUMULATIF
00-04	17.221	17.221	6,31
05-09	21.081	38.302	14,03
10-14	22.098	60.400	22,13
15-19	22.231	82.631	30,27
20-24	22.761	105.392	38,61
25-29	20.778	126.170	46,22
30-34	19.801	145.971	53,48
35-39	19.916	165.887	60,77
40-44	18.648	184.535	67,61
45-49	19.194	203.729	74,64
50-54	18.463	222.192	81,40
55-59	16.776	238.968	87,55
60-64	13.096	252.064	92,35
65-69	9.679	261.743	95,89
70-74	4.995	266.738	97,72
75 +	6.216	272.954	100,00
TOTAL	272.954		

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025, diolah.

Tabel 4-6 Jumlah Penduduk dan Umur Median

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		UMUR MEDIAN
		N	%	
1	HARUYAN	22.664	8,30	32,80
2	BATU BENAWA	20.898	7,66	34,09
3	LABUAN AMAS SELATAN	30.766	11,27	33,07
4	LABUAN AMAS UTARA	29.307	10,74	33,71
5	PANDAWAN	36.293	13,30	31,93
6	BARABAI	56.562	20,72	32,04
7	BATANG ALAI SELATAN	24.756	9,07	33,86
8	BATANG ALAI UTARA	19.416	7,11	32,72
9	HANTAKAN	13.327	4,88	30,49
10	BATANG ALAI TIMUR	7.526	2,76	29,16
11	LIMPASU	11.439	4,19	32,69
HULU SUNGAI TENGAH		272.954	100	32,60

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025, diolah.

4.1.2.1.3 Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Selain itu,

bisa juga dikatakan perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita.

Tabel 4-7 Rasio Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN
1	HARUYAN	11.510	11.154	22.664	103,19
2	BATU BENAWA	10.508	10.390	20.898	101,14
3	LABUAN AMAS SELATAN	15.384	15.382	30.766	100,01
4	LABUAN AMAS UTARA	14.752	14.555	29.307	101,35
5	PANDAWAN	18.417	17.876	36.293	103,03
6	BARABAI	28.193	28.369	56.562	99,38
7	BATANG ALAI SELATAN	12.333	12.423	24.756	99,28
8	BATANG ALAI UTARA	9.797	9.619	19.416	101,85
9	HANTAKAN	6.894	6.433	13.327	107,17
10	BATANG ALAI TIMUR	3.891	3.635	7.526	107,04
11	LIMPASU	5.831	5.608	11.439	103,98
HULU SUNGAI TENGAH		137.510	135.444	272.954	101,53

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025, diolah.

Jika rasio jenis kelamin lebih dari 100 berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Begitu pun sebaliknya, jika rasio jenis kelamin kurang dari 100 maka jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Pada tabel 4-7 didapat bahwa rasio jenis kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 101,53, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

4.1.2.1.4 Piramida Penduduk

Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan dalam bentuk grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida) menunjukkan jumlah penduduk (dalam hal ini diwakili dengan persentase jumlah penduduk), sumbu vertikal menunjukkan kelompok umur 5 tahunan. Dasar piramida dimulai dengan umur termuda hingga ke puncak kelompok umur tertua. Bagian kiri piramida adalah penduduk laki-laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan. Piramida penduduk ini menunjukkan jumlah penduduk atau persentase jumlah penduduk pada usia tertentu dan jenis kelamin tertentu terhadap jumlah penduduk total. Pada gambar piramida penduduk dibawah ini

terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolute tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun dan 10-14 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun kedepan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini. Piramida ini memiliki bentuk yang mendekati piramida ekspansif, yang menunjukkan jumlah penduduk yang besar di kelompok usia muda dan produktif, serta semakin berkurang pada kelompok usia lanjut. Piramida penduduk ini menunjukkan bahwa struktur demografi masih didominasi oleh kelompok usia muda dan produktif, yang menciptakan potensi bonus demografi jika dikelola dengan baik. Dengan perencanaan yang tepat, struktur demografi ini dapat menjadi aset yang berharga bagi pembangunan ekonomi dan sosial di masa depan. Pada kelompok usia 60 tahun ke atas, jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki, ini menandakan usia harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.



Gambar 4-1 Piramida Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025

4.1.2.1.5 Rasio Ketergantungan

Beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk usia tidak produktif (penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas) merupakan pengertian dari rasio ketergantungan. Apabila angka persentase *dependency ratio* semakin tinggi, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh penduduk yang berusia produktif untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan hidup penduduk yang tidak lagi atau belum produktif. Rasio ketergantungan secara umum dapat menggambarkan beban tanggungan ekonomi penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (0-14 tahun) dan terhadap usia 65 tahun ke atas.

Tabel 4-8 Rasio Ketergantungan

Kelompok Usia	Jumlah Penduduk				Rasio Ketergantungan (%)		
	Laki-laki	Perempuan	Total	%	Laki-laki	Perempuan	Total
Usia Muda (0-14)	31.185	29.215	60.400	22,13	32,03	30,98	31,51
Usia Produktif (15-64)	97.375	94.289	191.664	70,22	-		
Usia Tua (65 +)	8.950	11.940	20.890	7,65	9,19	12,66	10,90
TOTAL	137.510	135.444	272.954	100	41,22	43,65	42,41

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025, diolah.

Dari tabel 4-8 di atas maka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 adalah 42,41%. Ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif memiliki beban tanggungan sebanyak 42 orang yang belum dan dianggap tidak lagi produktif. Mayoritas kontribusi terhadap rasio ketergantungan ini berasal dari penduduk usia muda (di bawah 15 tahun) sebesar 31,51% dan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) sebesar 10,9%. Rasio ketergantungan ini penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan aspek gender dan usia penduduk. Kebutuhan untuk penduduk usia muda lebih menekankan pada pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatan. Di sisi lain, untuk penduduk usia tua lebih fokus pada aspek kesehatan.

4.1.2.2 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Status Perkawinan

Perkawinan merupakan indikator yang digunakan sebagai penentuan kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan

upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga berencana/pembangunan. Perkawinan bukan merupakan komponen yang langsung mempengaruhi pertumbuhan penduduk, namun mempunyai pengaruh cukup besar terhadap kelahiran yang merupakan salah satu unsur pertumbuhan. Informasi jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin digunakan untuk menggambarkan besarnya tingkat kelahiran dalam tahun tertentu. Dalam hal ini, konsep perkawinan difokuskan pada kondisi dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (de jure) maupun tanpa pengesahan perkawinan (de facto). Secara tidak langsung status perkawinan akan mempengaruhi tingkat kelahiran. Umumnya, suatu daerah dengan proporsi kawin yang tinggi, cenderung menaikkan angka kelahiran.

Tabel 4-9 Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan

NO	KECAMATAN	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	HARUYAN	5.727	4.145	5.196	5.270	285	457	302	1.282
2	BATU BENAWA	5.160	3.828	4.820	4.844	264	402	264	1.316
3	LABUAN AMAS SELATAN	7.454	5.695	7.171	7.277	401	607	358	1.803
4	LABUAN AMAS UTARA	6.964	5.282	7.048	7.085	339	462	401	1.726
5	PANDAWAN	9.216	6.935	8.234	8.299	487	656	480	1.986
6	BARABAI	14.002	11.356	12.748	12.802	799	1.107	644	3.104
7	BATANG ALAI SELATAN	5.967	4.504	5.695	5.773	336	553	335	1.593
8	BATANG ALAI UTARA	4.903	3.657	4.378	4.457	267	388	249	1.117
9	HANTAKAN	3.578	2.561	3.018	3.047	141	201	157	624
10	BATANG ALAI TIMUR	2.029	1.483	1.697	1.717	64	87	101	348
11	LIMPASU	2.851	2.102	2.713	2.735	106	173	161	598
HULU SUNGAI TENGAH		67.851	51.548	62.718	63.306	3.489	5.093	3.452	15.497

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025.

Pada Tabel 4-9 terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki yang berstatus belum kawin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Sebaliknya, jumlah penduduk laki-laki yang berstatus cerai lebih rendah daripada penduduk perempuan baik itu cerai hidup ataupun cerai mati. Hal ini terjadi di semua wilayah kecamatan.

4.1.2.2.1 Angka Perkawinan Kasar

Angka Perkawinan Kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu. Angka perkawinan kasar ini merupakan indikator perkawinan yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, tetapi bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga dan rumah tangga.

Tabel 4-10 Angka Perkawinan Kasar

WILAYAH	Jumlah Penduduk Semester I 2025	Jumlah Perkawinan	Angka Perkawinan Kasar
HULU SUNGAI TENGAH	272.140	2.450	9,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025, diolah.

Pada Tabel 4-10, angka perkawinan kasar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 9,00 yang artinya bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 dari 1.000 penduduk terdapat 9 kali peristiwa perkawinan.

4.1.2.2.2 Angka Perkawinan Umum

Angka Perkawinan Umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada suatu tahun tertentu. Angka Perkawinan Umum lebih cermat dibandingkan dengan Angka Perkawinan Kasar karena dalam perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang berisiko kawin saja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut. Sementara penduduk berusia di bawah 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai penyebut karena dianggap belum terpapar terhadap peristiwa perkawinan. Angka Perkawinan Umum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin pada tahun itu terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tabel 4-11 Angka Perkawinan Umum

WILAYAH	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas	Jumlah Perkawinan	Angka Perkawinan Umum
HULU SUNGAI TENGAH	212.554	2.450	11,53

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025, diolah.

Pada Tabel 4-11, angka perkawinan umum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 11,53 yang artinya bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 dari 1,000 penduduk terdapat 12 orang yang berstatus kawin atau sebanyak 12 kali terjadi peristiwa perkawinan.

4.1.2.2.3 Rata-rata Umur Kawin Pertama (SMAM)

Definisi Singulate Mean Age at Marriage (SMAM) adalah perkiraan (estimasi) rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin). Kegunaan tersedianya indikator rata-rata umur kawin pertama dengan metode SMAM akan memudahkan para penentu kebijakan dan perencana pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang perkawinan. Rata-rata usia kawin pertama dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Perempuan dan laki-laki yang kawin muda biasanya tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah.

Tabel 4-12 Jumlah Penduduk Per Usia yang Belum Kawin

KELOMPOK UMUR	Σ PENDUDUK BELUM KAWIN			Σ PENDUDUK		
	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
15 - 19	11.370	10711	22.081	11.387	10844	22.231
20 - 24	10.360	6888	17.248	11.944	10817	22.761
25 - 29	5.988	2265	8.253	11.041	9737	20.778
30- 34	3.285	729	4.014	10.413	9388	19.801
35 – 39	2.043	374	2.417	10.209	9707	19.916
40 – 44	1.306	234	1.540	9.484	9164	18.648
45 – 49	882	256	1.138	9.498	9696	19.194
50 - 54	552	270	822	8.986	9477	18.463
55 +	880	606	1.486	23.363	27399	50.762

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025, diolah.

Lanjutan Tabel 4-12

KELOMPOK UMUR	% LAJANG		
	L	P	JUMLAH
15 - 19	99,85	98,77	99,33
20 - 24	86,74	63,68	75,78
25 - 29	54,23	23,26	39,72
30 - 34	31,55	7,77	20,27
35 - 39	20,01	3,85	12,14
40 - 44	13,77	2,55	8,26
45 - 49	9,29	2,64	5,93
50 - 54	6,14	2,85	4,45
55 +	3,77	2,21	2,93

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025, diolah.

Dilihat dari tabel 4-12 di atas, kita ketahui bahwa pada kelompok usia terkecil (15-19 tahun) ada 99,33% penduduk yang belum kawin. Pada kelompok usia terbesar (55+ tahun) ada 2,93% penduduk yang belum pernah kawin. Data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kelompok usia, maka semakin sedikit penduduk yang berstatus belum kawin.

Tabel 4-13 Rata-rata Umur Kawin Pertama

WILAYAH	RATA-RATA KAWIN PERTAMA		
	L	P	JUMLAH
HULU SUNGAI TENGAH	30,36	24,83	27,73

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025, diolah.

Berdasarkan estimasi SMAM didapatkan angka 27,73 yang dapat diinterpretasikan sebagai rata-rata umur kawin pertama penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025. Artinya bahwa rata-rata umur kawin pertama penduduk pada tahun 2025 adalah umur 28 tahun, dan usia ini merupakan usia kawin pertama yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.1.2.2.4 Angka Perceraian Kasar

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan. Angka Perceraian Kasar menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk

keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Angka ini berguna untuk mengetahui gambaran sosiologis suatu daerah yang berkaitan dengan tingkat perceraian. Angka perceraian kasar ini merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, bagi daerah daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan perceraian serta jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga. Pada Tabel 4-14 dibawah Angka Perceraian Kasar dalam 1.000 penduduk Hulu Sungai Tengah terjadi 3 peristiwa perceraian kasar dalam satu tahun.

Tabel 4-14 Angka Perceraian Kasar

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK Semester I 2025	JUMLAH PERCERAIAN	ANGKA PERCERAIAN KASAR
HULU SUNGAI TENGAH	272.140	812	2,98

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025, diolah

4.1.2.2.5 Angka Perceraian Umum

Angka perceraian umum menunjukkan perbandingan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun untuk satu tahun tertentu. Angka perceraian umum dijadikan sebagai informasi data yang dipergunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk cerai hidup.

Tabel 4-15 Angka Perceraian Umum

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK Berusia 15 Tahun ke atas	JUMLAH PERCERAIAN	ANGKA PERCERAIAN UMUM
HULU SUNGAI TENGAH	212.554	812	3,82

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025, diolah.

Pada Tabel 4-15 maka angka perceraian umum di kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 3,82 artinya dalam 1.000 penduduk Hulu Sungai Tengah terjadi 4 peristiwa perceraian umum dalam satu tahun.

4.1.2.3 Keluarga

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.

Secara umum, keluarga terbagi menjadi dua tipe, yaitu:

1. Keluarga inti (*nuclear family*), merupakan keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.
2. Keluarga luas (*extended family*) adalah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

4.1.2.3.1 Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil. Pada Tabel 4-16 dibawah maka rata-rata jumlah anggota keluarga di kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 2,74. Artinya bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkisar 2-3 orang yang merupakan keluarga inti.

Tabel 4-16 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga

NO	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA			JUMLAH PENDUDUK	RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	HARUYAN	6.177	2.290	8.467	22.664	2,68
2	BATU BENAWA	5.687	2.014	7.701	20.898	2,71
3	LABUAN AMAS SELATAN	8.348	2.960	11.308	30.766	2,72
4	LABUAN AMAS UTARA	8.201	2.698	10.899	29.307	2,69
5	PANDAWAN	9.815	3.162	12.977	36.293	2,80
6	BARABAI	15.158	4.971	20.129	56.562	2,81
7	BATANG ALAI SELATAN	6.838	2.539	9.377	24.756	2,64
8	BATANG ALAI UTARA	5.218	1.908	7.126	19.416	2,72
9	HANTAKAN	3.588	1.170	4.758	13.327	2,80
10	BATANG ALAI TIMUR	2.026	659	2.685	7.526	2,80
11	LIMPASU	3.184	961	4.145	11.439	2,76
HULU SUNGAI TENGAH		74.240	25.332	99.572	272.954	2,74

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025, diolah.

4.1.2.3.2 Hubungan Dengan Kepala Keluarga.

Informasi mengenai hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat pola pengaturan tinggal bersama (living arrangement) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga, status hubungan setiap anggota dalam keluarga dengan kepala keluarga, meliputi: suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua, mertua atau famili lainnya (keponakan, saudara ipar), termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama, seperti: pembantu rumah tangga.

Tabel 4-17 Jumlah Anggota Keluarga Berdasarkan Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga

NO	STATUS HUBUNGAN DENGAN KEPALA KELUARGA	KEPALA KELUARGA					
		LAKI -LAKI		PEREMPUAN		L + P	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	KEPALA KELUARGA	74.240	53,99	25.332	18,70	99.572	36,48
2	SUAMI	2	0,001	0	0,00	2	0,001
3	ISTERI	0	0,00	59.229	43,73	59.229	21,70
4	ANAK	61.120	44,45	48.514	35,82	109.634	40,17
5	MENANTU	3	0,00	9	0,01	12	0,00
6	CUCU	1.008	0,73	647	0,48	1.655	0,61
7	ORANG TUA	35	0,03	451	0,33	486	0,18
8	MERTUA	19	0,01	256	0,19	275	0,10
9	FAMILI LAIN	1.020	0,74	946	0,70	1.966	0,72
10	PEMBANTU	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	LAINNYA	63	0,05	60	0,04	123	0,05
TOTAL		137.510	100	135.444	100	272.954	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025, diolah.

Pada tabel 4-17 di atas berdasarkan data status hubungan dalam keluarga, dari total 272.954 penduduk, sebanyak 99.572 orang atau 36,48% berperan sebagai kepala keluarga, dengan mayoritas diisi oleh laki-laki sebanyak 74.240 orang atau 53,99%, sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga berjumlah 25.332 orang atau 18,70%. Kategori terbesar dalam struktur keluarga adalah anak, yang mencakup 40,17% dari total populasi, terdiri dari 61.120 orang laki-laki atau 44,45% dan 48.514 orang perempuan atau 35,82%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk dalam keluarga adalah anak-anak, sedangkan kepala keluarga didominasi oleh laki-laki. Jumlah anggota keluarga lainnya, seperti orang tua dan mertua, relatif kecil, menunjukkan bahwa pola keluarga inti lebih umum dibandingkan keluarga besar yang tinggal bersama.

4.1.2.3.3 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Informasi tentang kelompok umur dari Kepala Keluarga dan anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Tabel 4-18 Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

KELOMPOK UMUR	KEPALA KELUARGA					
	LAKI -LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
15-19	115	0,15	184	0,73	299	0,30
20-24	2.240	3,02	588	2,32	2.828	2,84
25-29	5.791	7,80	836	3,30	6.627	6,66
30-34	7.845	10,57	1.197	4,73	9.042	9,08
35-39	8.738	11,77	1.419	5,60	10.157	10,20
40-44	8.632	11,63	1.495	5,90	10.127	10,17
45-49	9.012	12,14	1.949	7,69	10.961	11,01
50-54	8.775	11,82	2.553	10,08	11.328	11,38
55-59	7.945	10,70	3.284	12,96	11.229	11,28
60-64	6.284	8,46	3.256	12,85	9.540	9,58
65-69	4.409	5,94	3.301	13,03	7.710	7,74
70-74	2.304	3,10	1.943	7,67	4.247	4,27
75 +	2.150	2,90	3.327	13,13	5.477	5,50
TOTAL	74.240	100	25.332	100	99.572	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025, diolah

Pada Tabel 4-18 menunjukkan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah proporsi Kepala Keluarga tertinggi berada pada kelompok umur 50-54 tahun yaitu 11,38% dan proporsi Kepala keluarga laki-laki tertinggi berada di kelompok umur 45-49 tahun yaitu 12,14%, sedangkan proporsi Kepala Keluarga perempuan tertinggi berada di kelompok umur 75 tahun ke atas yaitu 13,13%. Yang menarik untuk diperhatikan adalah Kepala Keluarga berumur 75 tahun keatas yaitu sebesar 5,50% yang tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,06%, hal ini diasumsikan adanya peningkatan umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4.1.2.3.4 Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Perkawinan

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggungjawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial maupun psikologi. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati.

Tabel 4-19 Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Perkawinan

STATUS KAWIN	KEPALA KELUARGA					
	LAKI -LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
BELUM KAWIN	4.993	6,73	2.044	8,07	7.037	7,07
KAWIN	62.583	84,30	3.771	14,89	66.354	66,64
CERAI HIDUP	3.266	4,40	4.742	18,72	8.008	8,04
CERAI MATI	3.398	4,58	14.775	58,33	18.173	18,25
TOTAL	74.240	100	25.332	100	99.572	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025.

Pada tabel 4-19 di atas terlihat bahwa secara keseluruhan kepala keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 berstatus kawin adalah 66,64%, dan adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) yang besarnya 7,07%, selanjutnya persentase kepala keluarga berstatus cerai cerai hidup adalah sebesar 8,04%, sedangkan kepala keluarga berstatus cerai mati adalah sebesar 18,25%. Jika dikaitkan dengan jenis kelamin terlihat kepala keluarga laki-laki yang berstatus kawin lebih rendah daripada kepala keluarga perempuan. Apabila

diperhatikan lebih lanjut, kepala keluarga laki-laki berstatus cerai (baik cerai hidup maupun cerai mati) persentasenya lebih rendah yakni 8,98% daripada kepala keluarga perempuan yang berstatus cerai yakni 77,05%. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa laki-laki masih mendominasi sebagai kepala keluarga dalam semua kategori status perkawinan. Namun, jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga cukup signifikan, terutama pada kelompok cerai hidup dan cerai mati, yang menunjukkan bahwa perempuan lebih sering menjadi kepala keluarga setelah peristiwa perpisahan atau kehilangan pasangan.

4.1.2.3.5 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi yang dicapai oleh seorang kepala keluarga, diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga. Untuk itu jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Tabel 4-20 Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan

JENJANG PENDIDIKAN	KEPALA KELUARGA					
	LAKI -LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
TIDAK/BELUM SEKOLAH	1.340	1,80	1.068	4,22	2.408	2,42
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	5.947	8,01	3.660	14,45	9.607	9,65
TAMAT SD/SEDERAJAT	26.930	36,27	12.278	48,47	39.208	39,38
SLTP/SEDERAJAT	13.939	18,78	3.469	13,69	17.408	17,48
SLTA/SEDERAJAT	19.776	26,64	3.491	13,78	23.267	23,37
DIPLOMA I/II	614	0,83	260	1,03	874	0,88
AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	945	1,27	190	0,75	1.135	1,14
DIPLOMA IV/STRATA I	4.548	6,13	886	3,50	5.434	5,46
STRATA-II	196	0,26	29	0,11	225	0,23
STRATA-III	5	0,01	1	0,00	6	0,01
TOTAL	74.240	100	25.332	100	99.572	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025.

Tabel 4-20 di atas menunjukkan bahwa Kepala Keluarga berpendidikan Tamat SD/Sederajat sebesar 39,38%, disusul berpendidikan SLTP/Sederajat yaitu sebesar 17,48% dan SLTA/Sederajat sebesar 23,37%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga memiliki pendidikan dasar hingga menengah.

Proporsi Kepala Keluarga yang berpendidikan D1/D2/D3 hanya sebesar 2,02% dan S1/S2/S3 sebesar 5,70%. Kepala Keluarga yang tidak sekolah yang persentasenya mencapai 2,42%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas kepala keluarga memiliki pendidikan maksimal pada tingkat menengah, dengan jumlah yang semakin berkurang pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Laki-laki mendominasi hampir di semua kategori pendidikan, sementara perempuan memiliki proporsi yang lebih rendah, terutama di tingkat pendidikan tinggi.

4.1.2.3.6 Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap pot ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Tabel 4-21 Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan

STATUS PEKERJAAN	KEPALA KELUARGA					
	LAKI -LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
BEKERJA	71.209	95,92	13.532	53,42	84.741	85,11
TIDAK/BELUM BEKERJA	1.157	1,56	1.155	4,56	2.312	2,32
PELAJAR/MAHASISWA	585	0,79	341	1,35	926	0,93
PENSIUNAN	1.282	1,73	697	2,75	1.979	1,99
MENGURUS RUMAH TANGGA	7	0,01	9.607	37,92	9.614	9,66
TOTAL	74.240	100	25.332	100	99.572	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025, diolah.

Menurut tabel 4-21 dilihat dari kegiatan ekonomi bahwa sekitar 85,11% kepala keluarga bekerja. Angka ini lebih tinggi pada kepala keluarga laki-laki dibandingkan kepala keluarga perempuan, ini menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan untuk perempuan terbatas. Sementara itu, sekitar 2,32% kepala keluarga sedang mencari pekerjaan atau belum/tidak bekerja. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkaitan dengan adanya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja, walaupun persentase mereka kecil, sehingga Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu membuat

perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Selanjutnya, tabel di atas juga menunjukkan kepala keluarga yang berstatus mengurus rumah tangga, dalam hal ini perempuan yaitu 9,66%.

4.1.2.4 Penduduk menurut Karakteristik Sosial

Penduduk suatu wilayah memiliki beragam karakteristik sosial yang dapat dikaji dari berbagai aspek, seperti tingkat pendidikan, agama yang dianut, serta kondisi kesehatan atau kecacatan. Pemahaman terhadap karakteristik sosial ini penting untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

4.1.2.4.1 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Tingkat pendidikan juga dianggap sebagai investasi Sumber Daya Manusia (human capital investment) selain Kesehatan. Tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan makin baiknya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, sekaligus juga menunjukkan makin tingginya tingkat sosial ekonomi masyarakat. Pendidikan yang tinggi memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, juga pendapatan yang lebih baik, dan pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Peningkatan pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pada gilirannya akan berdampak pada perbaikan kinerja dalam melakukan pekerjaan. Perbaikan kinerja dalam pengertian ekonomis berarti terjadi peningkatan output yang dihasilkan. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan menunjukkan sebaran masyarakat berdasarkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh, mulai dari tidak sekolah, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

Tabel 4-22 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	37.903	27,56	35.506	26,21	73.409	26,89
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	16.375	11,91	15.558	11,49	31.933	11,70
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	33.783	24,57	36.542	26,98	70.325	25,76
4	SLTP/SEDERAJAT	18.985	13,81	18.801	13,88	37.786	13,84
5	SLTA/SEDERAJAT	23.772	17,29	20.030	14,79	43.802	16,05
6	DIPLOMA I/II	626	0,46	808	0,60	1.434	0,53
7	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA	1010	0,73	1.556	1,15	2.566	0,94
8	DIPLOMA IV/STRATA I	4.845	3,52	6.496	4,80	11.341	4,15
9	STRATA II	206	0,15	145	0,11	351	0,13
10	STRATA III	5	0,004	2	0,001	7	0,003
TOTAL		137.510	100	135.444	100	272.954	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025

Pada Tabel 4-22 diatas terlihat penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah 25,76% berpendidikan Tamat SD/Sederajat, 13,84% berpendidikan SLTP/Sederajat dan 16,05% berpendidikan SLTA/Sederajat. Secara keseluruhan, mayoritas penduduk memiliki pendidikan hingga tingkat dasar dan menengah, dengan jumlah lulusan pendidikan tinggi yang masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak penduduk yang memiliki keterampilan dan kompetensi lebih baik dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Selain itu, distribusi pendidikan antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi kedua gender sudah cukup merata.

4.1.2.4.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama merupakan bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang mempengaruhi berbagai aspek, termasuk norma, budaya, dan perilaku sosial. Jumlah penduduk menurut agama menunjukkan sebaran masyarakat berdasarkan keyakinan yang dianut. Data ini dapat digunakan untuk memahami pluralitas sosial, menjaga kerukunan antarumat beragama, serta merancang kebijakan yang mendukung kehidupan beragama yang harmonis dan toleran.

Pada Tabel 4-23 dibawah terlihat bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah beragama Islam sebesar 266.297 Jiwa atau 97,56%. Agama kedua terbesar yang dianut adalah Hindu yakni sebesar 5.219 Jiwa atau 1,91%, dan hanya sebagian kecil yang menganut agama Kristen, Katolik, Budha, Khong Hu Cu, serta Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari data ini, terlihat bahwa agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh hampir seluruh penduduk. Sementara itu, penganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan kepercayaan lain memiliki jumlah yang lebih kecil. Dengan komposisi yang beragam ini, toleransi dan keharmonisan antarumat beragama menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya di masyarakat.

Tabel 4-23 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

NO	KECAMATAN	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU
1	HARUYAN	22.664	0	0	0
2	BATU BENAWA	20.882	15	1	0
3	LABUAN AMAS SELATAN	30.765	1	0	0
4	LABUAN AMAS UTARA	29.306	0	1	0
5	PANDAWAN	36.287	6	0	0
6	BARABAI	56.374	129	35	14
7	BATANG ALAI SELATAN	23.861	472	3	416
8	BATANG ALAI UTARA	19.412	4	0	0
9	HANTAKAN	10.965	161	1	2.024
10	BATANG ALAI TIMUR	4.344	105	2	2.763
11	LIMPASU	11.437	0	0	2
HULU SUNGAI TENGAH		266.297	893	43	5.219

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025

Lanjutan Tabel 4-23

NO	KECAMATAN	BUDHA	KHONGHUCU	KEPERCAYAAN	JUMLAH
1	HARUYAN	0	0	0	22.664
2	BATU BENAWA	0	0	0	20.898
3	LABUAN AMAS SELATAN	0	0	0	30.766
4	LABUAN AMAS UTARA	0	0	0	29.307
5	PANDAWAN	0	0	0	36.293
6	BARABAI	10	0	0	56.562
7	BATANG ALAI SELATAN	2	0	2	24.756
8	BATANG ALAI UTARA	0	0	0	19.416
9	HANTAKAN	8	3	165	13.327
10	BATANG ALAI TIMUR	79	0	233	7.526
11	LIMPASU	0	0	0	11.439
HULU SUNGAI TENGAH		99	3	400	272.954

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025

4.1.2.4.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Disabilitas

Jumlah penduduk menurut kecacatan menggambarkan sebaran masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik. Data ini penting dalam perencanaan kebijakan inklusif, seperti aksesibilitas fasilitas umum, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, serta program-program kesejahteraan sosial yang memastikan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami jumlah serta jenis kecacatan yang dimiliki penduduk, pemerintah dan lembaga terkait dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan mendukung bagi penyandang disabilitas.

Tabel 4-24 Jumlah Penduduk menurut Jenis Disabilitas

NO	KECAMATAN	KELAINAN FISIK	TUNA NETRA	TUNA RUNGU/WICARA	KELAINAN MENTAL/JIWA
1	HARUYAN	70	16	14	58
2	BATU BENAWA	14	6	12	42
3	LABUAN AMAS SELATAN	29	11	21	64
4	LABUAN AMAS UTARA	22	9	11	29
5	PANDAWAN	99	14	52	86
6	BARABAI	15	17	24	80
7	BATANG ALAI SELATAN	21	15	9	37
8	BATANG ALAI UTARA	23	11	17	45
9	HANTAKAN	6	3	4	46
10	BATANG ALAI TIMUR	1	0	1	6
11	LIMPASU	27	11	6	19
HULU SUNGAI TENGAH		327	113	171	512

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025.

Lanjutan Tabel 4-24

NO	KECAMATAN	KELAINAN FISIK DAN MENTAL	LAIN-LAIN	JUMLAH
1	HARUYAN	1	6	165
2	BATU BENAWA	8	5	87
3	LABUAN AMAS SELATAN	5	18	148
4	LABUAN AMAS UTARA	3	8	82
5	PANDAWAN	16	11	278
6	BARABAI	16	17	169
7	BATANG ALAI SELATAN	5	5	92
8	BATANG ALAI UTARA	7	1	104
9	HANTAKAN	5	1	65
10	BATANG ALAI TIMUR	3	1	12
11	LIMPASU	3	3	69
HULU SUNGAI TENGAH		72	76	1271

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025

Pada Tabel 4-24 terlihat bahwa 512 jiwa atau 40,28% penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan penyandang kelainan mental/jiwa dari seluruh penduduk penyandang disabilitas 1271 jiwa. Selanjutnya penyandang disabilitas kelainan fisik menempati urutan kedua yakni 327 jiwa atau 25,73%. Dengan jumlah penyandang disabilitas yang cukup signifikan, diperlukan perhatian lebih dalam penyediaan aksesibilitas, layanan kesehatan, serta peluang pendidikan dan pekerjaan yang inklusif agar mereka dapat berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

4.1.2.5 Kelahiran

Selain faktor migrasi, angka kesuburan dan kelahiran juga menjadi faktor pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Tingginya angka kelahiran berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan pada akhirnya akan ada kebutuhan akan fasilitas pendidikan dan lapangan kerja di masa mendatang. Tingkat kelahiran di masa lalu akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran di masa kini.

4.1.2.5.1 Angka Kelahiran Kasar (CRB)

Angka kelahiran kasar atau crude birth rate/CBR menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar merupakan ukuran yang paling mudah dihitung tetapi masih kasar karena tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang beresiko melahirkan (laki-laki, anak-anak dan orangtua/lansia). Angka Kelahiran Kasar ini berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada tahun tertentu. Perubahan angka kelahiran kasar juga dapat mencerminkan perkembangan sosial dan ekonomi suatu daerah, termasuk peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, perubahan pola keluarga, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4-25 Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR)

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN	JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN	CBR
1	HARUYAN	192	22.632	8,48
2	BATU BENAWA	185	20.883	8,86
3	LABUAN AMAS SELATAN	289	30.642	9,43
4	LABUAN AMAS UTARA	280	29.166	9,6
5	PANDAWAN	391	36.194	10,8
6	BARABAI	627	56.329	11,13
7	BATANG ALAI SELATAN	253	24.673	10,25
8	BATANG ALAI UTARA	171	19.374	8,83
9	HANTAKAN	102	13.292	7,67
10	BATANG ALAI TIMUR	62	7.524	8,24
11	LIMPASU	96	11.431	8,4
	HULU SUNGAI TENGAH	2.648	272.140	9,73

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025.

Pada Tabel 4-25 Jumlah kelahiran tahun 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah 2.648 jiwa dan jumlah penduduk Tengah Tahun atau Semester I tahun 2025 adalah 272.140 jiwa. Dengan demikian Angka Kelahiran Kasar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 adalah 9,73, artinya dari 1.000 penduduk pada tahun 2025 terjadi 9-10 kelahiran hidup.

4.1.2.5.2 Angka Kelahiran Umum (GFR)

Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan anak usia dini, termasuk pemenuhan kesempatan kerja. Tingkat kelahiran tahun yang lalu akan mempengaruhi tingkat kelahiran pada tahun berikutnya, sehingga pengetahuan mengenai fertilitas beserta indikator-indikatornya, termasuk Keluarga Berencana sangat berguna bagi penentu kebijakan maupun perencanaan dalam menyusun program-program pembangunan terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, ibu dan anak.

Tabel 4-26 Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate/GFR)

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN	PEREMPUAN USIA 15 - 49	GFR
1	HARUYAN	192	5.716	33,59
2	BATU BENAWA	185	5.206	35,54
3	LABUAN AMAS SELATAN	289	7.640	37,83
4	LABUAN AMAS UTARA	280	7.156	39,13
5	PANDAWAN	391	9.179	42,60
6	BARABAI	627	14.895	42,09
7	BATANG ALAI SELATAN	253	6.192	40,86
8	BATANG ALAI UTARA	171	4.875	35,08
9	HANTAKAN	102	3.570	28,57
10	BATANG ALAI TIMUR	62	1.993	31,11
11	LIMPASU	96	2.931	32,75
	HULU SUNGAI TENGAH	2.648	69.353	38,18

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025

Pada Tabel 4-26 Jumlah kelahiran tahun 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah 2.648 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan Usia 15 – 49 Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 adalah 69.353 jiwa. Dengan demikian Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate/GFR) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 adalah 38,18 artinya dari 1.000 penduduk pada tahun 2025 terjadi 38 kelahiran hidup.

4.1.2.6 Kematian

Kematian atau Mortalitas adalah salah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap jumlah dan struktur penduduk. Tinggi rendahnya tingkat kematian tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk. Angka kematian biasanya dinyatakan dalam bentuk "rate" yang mengukur jumlah kematian dalam periode tertentu per jumlah penduduk di wilayah tersebut. Ukuran ini memberikan gambaran tentang risiko kematian di suatu daerah serta membantu pemerintah dalam perencanaan kebijakan kesehatan dan sosial yang lebih efektif. Dengan data yang akurat, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan harapan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4.1.2.6.1 Angka Kematian Kasar

Angka Kematian merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi jumlah penduduk. World Health Organization (WHO) mengartikan bahwa kematian merupakan suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup dan terjadi di kalangan apapun. Angka kematian mempengaruhi masalah sosial, ekonomi, adat istiadat maupun kesehatan pada wilayah tersebut. Tinggi rendahnya angka kematian di suatu wilayah mencerminkan kondisi kesehatan penduduk di suatu daerah tertentu. Angka Kematian Kasar (CDR) merupakan angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada tahun tertentu per 1000 penduduk. Angka kematian kasar merupakan indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk dan jenis kelamin.

Pada tabel 4-27 dibawah Jumlah pelaporan kematian penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan registrasi penduduk per semester II tahun 2025 adalah 2.789 jiwa. Sedangkan angka kematian kasar adalah 10,25. Artinya bahwa dari 1.000 penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi kematian sebanyak 10 orang.

Tabel 4-27 Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate/CDR)

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN	JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN	ANGKA KEMATIAN KASAR (CDR)
1	HARUYAN	229	22.632	10,12
2	BATU BENAWA	204	20.883	9,77
3	LABUAN AMAS SELATAN	253	30.642	8,26
4	LABUAN AMAS UTARA	295	29.166	10,11
5	PANDAWAN	407	36.194	11,24
6	BARABAI	631	56.329	11,20
7	BATANG ALAI SELATAN	297	24.673	12,04
8	BATANG ALAI UTARA	212	19.374	10,94
9	HANTAKAN	101	13.292	7,60
10	BATANG ALAI TIMUR	47	7.524	6,25
11	LIMPASU	113	11.431	9,89
HULU SUNGAI TENGAH		2.789	272.140	10,25

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025.

4.2 Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Kualitas penduduk tidak hanya mencakup aspek jumlah dan pertumbuhan penduduk, tetapi juga kondisi kesehatan, tingkat pendidikan, serta kesejahteraan ekonomi dan sosial. Penduduk yang berkualitas memiliki tingkat kesehatan yang baik, akses terhadap pendidikan yang memadai, serta keterampilan yang mendukung daya saing di dunia kerja. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penduduk menjadi prioritas dalam pembangunan, terutama melalui program kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

4.2.1 Kesehatan

Kesehatan merupakan indikator utama dalam menilai kualitas penduduk. Kondisi kesehatan masyarakat mencerminkan tingkat kesejahteraan dan keberhasilan layanan kesehatan di suatu daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan meliputi akses terhadap fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, pola hidup masyarakat, serta kondisi lingkungan. Dengan sistem kesehatan yang baik, diharapkan angka kematian dapat ditekan, angka harapan hidup meningkat, serta kualitas penduduk secara keseluruhan dapat terus berkembang.

4.2.1.1 Angka Kematian Bayi (IMR/AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 1 tahun, atau didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia di bawah 1 tahun pada 1000 kelahiran hidup dalam satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara umum ada dua penyebab kematian bayi, penyebab endogen dan eksogen. *Kematian bayi endogen* atau yang umum disebut dengan *kematian neonatal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor – faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat kehamilan. *Kematian bayi eksogen* atau kematian *post neo natal* adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia 1 bulan sampai menjelang usia 1 tahun yang disebabkan oleh faktor–faktor dari luar atau faktor lingkungan eksternal.

Angka kematian bayi/IMR digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pada tabel 4-28 dibawah, maka angka kematian bayi usia di bawah 1 tahun sebesar 13,45 artinya terjadi 13 kematian bayi usia 0–1 tahun untuk setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.

Tabel 4-28 Angka Kematian Bayi (IMR/AKB)

No	Puskesmas	Jumlah Kelahiran (Jumlah bayi lahir hidup)	Jumlah Kematian Bayi < 1 tahun	Angka Kematian Bayi (IMR/AKB)
1	Kasarangan	174	3	17,24
2	Sungai Buluh	146	4	27,40
3	Pantai Hambawang	204	4	19,61
4	Durian Gantang	131	3	22,90
5	Haruyan	177	2	11,30
6	Barikin	76	0	0
7	Barabai	729	6	8,23
8	Awang Besar	117	1	8,55
9	Birayang	145	1	6,90
10	Kubur Jawa	115	0	0
11	Ilung	143	2	13,99
12	Batu Tangga	62	1	16,13
13	Tandilang	35	1	28,57
14	Limpasu	113	1	8,85
15	Pagat	100	1	10,00
16	Kalibaru	100	1	10,00
17	Hantakan	164	7	42,68
18	Pandawan	215	2	9,30
19	Kambat Utara	176	2	11,36
TOTAL		3122	42	13,45

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025, diolah

4.2.1.2 Angka Kematian Neonatal (NNDR)

Kematian neonatal atau kematian endogen adalah kematian yang terjadi sebelum bayi mencapai usia satu bulan atau 28 hari. Angka ini biasanya dinyatakan dalam jumlah kematian per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu. Sebagian besar kasus kematian neonatal disebabkan oleh faktor-faktor yang sudah ada sejak lahir atau selama masa kehamilan. Beberapa penyebab utama meliputi kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, komplikasi saat persalinan, serta infeksi yang terjadi dalam periode awal kehidupan bayi. Selain itu, faktor

kesehatan ibu selama kehamilan, seperti kekurangan gizi, hipertensi, atau penyakit infeksi, juga dapat meningkatkan risiko kematian neonatal. Pada Tabel 4-29 angka kematian bayi usia di bawah 1 bulan adalah 12,17 artinya terjadi 12 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.

Tabel 4-29 Angka Kematian Neonatal (NNDR)

No	Puskesmas	Jumlah Kelahiran (Jumlah bayi lahir hidup)	Jumlah Kematian Bayi < 1 Bulan	Angka Kematian Neonatal (NNDR)
1	Kasarangan	174	3	17,24
2	Sungai Buluh	146	4	27,40
3	Pantai Hambawang	204	4	19,61
4	Durian Gantang	131	3	22,90
5	Haruyan	177	1	5,65
6	Barikin	76	0	0
7	Barabai	729	6	8,23
8	Awang Besar	117	1	8,55
9	Birayang	145	1	6,90
10	Kubur Jawa	115	0	0
11	Ilung	143	2	13,99
12	Batu Tangga	62	0	0
13	Tandilang	35	1	28,57
14	Limpasu	113	1	8,85
15	Pagat	100	1	10,00
16	Kalibaru	100	1	10,00
17	Hantakan	164	6	36,59
18	Pandawan	215	2	9,30
19	Kambat Utara	176	1	5,68
TOTAL		3122	38	12,17

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025, diolah

4.2.1.3 Angka Kematian Anak

Yang dimaksud anak adalah penduduk usia 1 tahun hingga 4 tahun 11 bulan 29 hari, dan angka kematian anak adalah perbandingan jumlah kematian anak usia 1–4 tahun dengan jumlah penduduk 1-4 tahun dikalikan 1.000 penduduk. Angka ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kesehatan lingkungan serta efektivitas layanan kesehatan yang tersedia bagi anak-anak. Tingkat kematian anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kecukupan gizi, pola asuh, akses terhadap layanan kesehatan, serta kondisi sanitasi dan kebersihan

lingkungan. Menurut Tabel 4-30 dibawah maka angka kematian anak tahun 2025 adalah 0 artinya tidak ada kematian anak dalam satu tahun.

Tabel 4-30 Angka Kematian Anak

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN ANAK	JUMLAH PENDUDUK USIA 1-4 THN	ANGKA KEMATIAN ANAK
1	HARUYAN	0	1.200	0
2	BATU BENAWA	0	1.062	0
3	LABUAN AMAS SELATAN	0	1.707	0
4	LABUAN AMAS UTARA	0	1.536	0
5	PANDAWAN	0	2.042	0
6	BARABAI	0	3.011	0
7	BATANG ALAI SELATAN	0	1.276	0
8	BATANG ALAI UTARA	0	989	0
9	HANTAKAN	0	718	0
10	BATANG ALAI TIMUR	0	424	0
11	LIMPASU	0	587	0
HULU SUNGAI TENGAH		0	14.552	0

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025, Diolah.

4.2.1.4 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 1.000 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan oleh faktor yang berkaitan langsung dengan kehamilan dan persalinan, seperti komplikasi kehamilan, perdarahan, infeksi, preeklampsia, eklampsia, serta komplikasi akibat penanganan medis yang kurang optimal. Tingginya angka kematian ibu mencerminkan kualitas layanan kesehatan maternal dan akses terhadap fasilitas medis yang memadai. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kondisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan ibu, serta keterlambatan dalam mengenali bahaya kehamilan, mencapai fasilitas kesehatan, dan mendapatkan penanganan yang tepat. Kematian yang disebabkan penyakit yang tidak berhubungan dengan melahirkan dan kematian akibat kecelakaan tidak dimasukkan pada Kematian Ibu. Informasi mengenai tingginya MMR/AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan menjadikan kehamilan yang aman

dan bebas resiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran serta edukasi tentang kehamilan sehat dan persalinan yang aman sangat penting untuk menekan angka kematian ibu di masa mendatang. Pada Tabel 4-31 dibawah dapat dilihat bahwa angka kematian ibu akibat melahirkan adalah 2,56 atau sekitar 2-3 orang ibu meninggal untuk setiap 1.000 kelahiran pada tahun 2025.

Tabel 4-31 Angka Kematian Ibu

No	Puskesmas	Jumlah Kelahiran (Jumlah bayi lahir hidup)	Jumlah Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu
1	Kasarangan	174	0	0
2	Sungai Buluh	146	1	6,85
3	Pantai Hambawang	204	0	0
4	Durian Gantang	131	0	0
5	Haruyan	177	0	0
6	Barikin	76	1	13
7	Barabai	729	2	2,74
8	Awang Besar	117	1	8,55
9	Birayang	145	0	0
10	Kubur Jawa	115	0	0
11	Ilung	143	1	6,99
12	Batu Tangga	62	0	0
13	Tandilang	35	0	0
14	Limpasu	113	0	0
15	Pagat	100	1	10,00
16	Kalibaru	100	0	0
17	Hantakan	164	1	6,10
18	Pandawan	215	0	0
19	Kambat Utara	176	0	0
TOTAL		3122	8	2,56

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025, diolah.

4.2.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan sosial serta ekonomi. Indikator pendidikan digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pendidikan penduduk di suatu wilayah. Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan angka penduduk putus sekolah.

4.2.2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur kapasitas sektor pendidikan dalam menampung penduduk usia sekolah dan memperhitungkan perubahan usia penduduk, khususnya generasi muda. Sebagai contoh, Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (SD) adalah perbandingan antara jumlah murid yang duduk di Sekolah Dasar terhadap jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun.

Tabel 4-32 Usia Standar disetiap Jenjang Pendidikan

JENJANG PENDIDIKAN	KELOMPOK USIA
SD	7-12 tahun
SLTP	13-15 tahun
SLTA	16-18 tahun
Perguruan Tinggi	19-24 tahun

Angka Partisipasi Kasar dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok usia standar yang berkaitan dengan jenjang masing-masing pendidikan. Penyajian Angka Partisipasi Kasar dibuat dalam bentuk tabel Angka Partisipasi Kasar setiap jenjang pendidikan.

Tabel 4-33 Angka Partisipasi Kasar (APK)

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	SISWA	PENDUDUK USIA SEKOLAH	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) (%)
1	SD	18.468	25.861	71,4
2	SLTP	4.148	13.660	30,4

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, Tahun 2025.

Pada Tabel 4-33 Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 untuk jenjang pendidikan SD adalah 71,4% artinya bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun adalah 71 jiwa bersekolah dibangku SD. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTP adalah 30,4% artinya bahwa dari 100 penduduk usia 13-15 tahun adalah 30 jiwa bersekolah dibangku SLTP.

4.2.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Murni ini dapat menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Seperti halnya APK. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Namun APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK, karena APM melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya.

Tabel 4-34 Angka Partisipasi Murni (APM)

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	SISWA	PENDUDUK USIA SEKOLAH	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) (%)
1	SD	16.997	25.861	65,7
2	SLTP	3.455	13.660	25,3

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, Tahun 2025.

Pada Tabel 4-34 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 untuk jenjang pendidikan SD adalah 65,7% artinya bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun adalah 66 jiwa bersekolah dibangku SD. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTP adalah 25,3% artinya bahwa dari 100 penduduk usia 13-15 tahun adalah 25 jiwa bersekolah dibangku SLTP.

4.2.2.3 Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah menyajikan persentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan. Angka penduduk putus sekolah mencerminkan jumlah individu yang tidak berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang

sedang ditempuh. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan ini antara lain kondisi ekonomi keluarga yang sulit, keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, serta faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi keputusan individu untuk melanjutkan sekolah atau tidak. Tingginya angka putus sekolah dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk menekan angka ini, seperti pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, serta penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak. Angka Putus Sekolah murid SD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 1,22%. Sedangkan Angka Putus Sekolah murid SLTP 15,23%.

Tabel 4-35 Angka Putus Sekolah (APS)

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa Putus Sekolah	Jumlah Siswa yang Terdaftar/Bersekolah	Angka Putus sekolah (%)
1	SD	225	18.469	1,22
2	SLTP	643	4.221	15,23

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, Tahun 2025.

4.2.3 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, mencakup aspek sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ini meliputi perlindungan, pengembangan, serta pengaturan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Secara sederhana, ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, mulai dari proses mencari kerja, bekerja, hingga pensiun, serta regulasi yang mengaturnya.

4.2.3.1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) mengukur proporsi penduduk usia 15-64 tahun yang tergolong sebagai angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total penduduk dalam rentang usia tersebut. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan penduduk usia produktif dalam pasar tenaga kerja, mencerminkan sejauh mana

mereka berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Indikator ini sangat penting dalam menganalisis dinamika ketenagakerjaan, karena menunjukkan seberapa besar bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif. Dengan memahami tingkat partisipasi angkatan kerja, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengatasi pengangguran, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Tabel 4-36 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Kelompok Umur	Angkatan Kerja			Jumlah Bukan Angkatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja	APAK (%)
	Bekerja	Pencari Kerja	Jumlah Angkatan kerja			
15-19	303	11.764	12.067	10.164	22.231	54,28
20-24	12.374	112	12.486	4.290	16.776	74,43
25-29	13.010	657	13.667	6.249	19.916	68,62
30-34	3.730	5.666	9.396	13.365	22.761	41,28
35-39	9.631	81	9.712	3.384	13.096	74,16
40-44	12.977	145	13.122	5.341	18.463	71,07
45-49	13.089	232	13.321	5.873	19.194	69,40
50-54	12.548	332	12.880	5.768	18.648	69,07
55-59	8.427	2.620	11.047	9.731	20.778	53,17
60-64	11.735	1.496	13.231	6.570	19.801	66,82
TOTAL	97.824	23.105	120.929	70.735	191.664	63,09

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025

Sesuai tabel 4-36 diatas maka APAK Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 63,09% artinya 63 jiwa penduduk usia 15-64 tahun yang terlibat atau berusaha terlibat (mencari pekerjaan) dalam kegiatan produktif. Semakin tinggi APAK berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif. Pada tabel 4-36 terlihat bahwa penduduk yang berumur 20-24 tahun mempunyai APAK paling tinggi yaitu 74,43%, sedangkan penduduk yang berumur 55-59 tahun memiliki APAK paling rendah sebesar 53,17%.

4.2.4 Sosial

Dalam aspek sosial, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menilai kesejahteraan masyarakat, di antaranya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan proporsi penduduk penyandang disabilitas. Indikator-indikator ini penting untuk memahami kondisi sosial-ekonomi penduduk serta merancang kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2.4.1 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin Hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, ruhani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan sosial berupa keterlantaran, kecacatan, kemiskinan, bencana dan lain sebagainya menjadi salah satu penyebab yang membuat seseorang atau sekelompok orang mengalami disfungsi terhadap fungsi sosialnya di masyarakat.

Tabel 4-37 PPKS Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2025

No	JENIS PPKS	JUMLAH
1	Anak Balita Telantar	2
2	Anak Terlantar	30
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	26
4	Anak Jalanan	0
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	50
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	42
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	42
8	Lanjut Usia Telantar	30
9	Penyandang Disabilitas	100
10	Tuna Susila	0
11	Gelandangan	0
12	Pengemis	13
13	Pemulung	6
14	Kelompok Minoritas	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	3
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0
18	Korban Trafficking	0

Tabel 4-37 Lanjutan

No	JENIS PKKS	JUMLAH
19	Korban Tindak Kekerasan	62
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	2
21	Korban Bencana Alam	135
22	Korban Bencana Sosial	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	98
24	Fakir Miskin	0
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0
26	Komunitas Adat Terpencil	0
TOTAL		642

Sumber : Dinas Sosial, PP, KB, PP DAN PA Kab. Hulu Sungai Tengah, Tahun 2025.

4.2.4.2 Proporsi Penyandang Disabilitas

Perbandingan jumlah penduduk penyandang disabilitas dengan jumlah penduduk merupakan indikator angka penduduk penyandang cacat. Indikator ini digunakan untuk menyusun kebijakan pemerintah dalam pengembangan pelayanan bagi penduduk penyandang cacat menurut jenis kecacatannya. Penduduk penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Tingginya proporsi penduduk penyandang cacat menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif, seperti penyediaan aksesibilitas yang lebih baik dalam fasilitas umum, pendidikan inklusif, serta peluang kerja yang sesuai dengan kondisi mereka. Selain itu, peningkatan layanan kesehatan rehabilitatif dan dukungan sosial sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang penting juga untuk dijawab adalah apakah masih ada penyandang disabilitas yang belum terjangkau oleh pendataan, mengingat masih ada persepsi di masyarakat dimana keluarga dengan penyandang disabilitas, memilih menyembunyikan penyandang disabilitas karena rasa malu. Dari tabel 4-38 dibawah dapat dilihat bahwa dari 272.954 jiwa penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat 1.271 jiwa penduduk disabilitas atau terdapat 4 – 5 jiwa penyandang disabilitas per 1000 penduduk.

Tabel 4-38 Proporsi Penduduk Penyandang Disabilitas 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	PENDUDUK DISABILITAS	ANGKA PENYANDANG DISABILITAS (PER 1000 PENDUDUK)
1	HARUYAN	22.664	165	7,28
2	BATU BENAWA	20.898	87	4,16
3	LABUAN AMAS SELATAN	30.766	148	4,81
4	LABUAN AMAS UTARA	29.307	82	2,80
5	PANDAWAN	36.293	278	7,66
6	BARABAI	56.562	169	2,99
7	BATANG ALAI SELATAN	24.756	92	3,72
8	BATANG ALAI UTARA	19.416	104	5,36
9	HANTAKAN	13.327	65	4,88
10	BATANG ALAI TIMUR	7.526	12	1,59
11	LIMPASU	11.439	69	6,03
HULU SUNGAI TENGAH		272.954	1271	4,66

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025, diolah.

4.3 Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk merupakan dinamika penting dalam studi kependudukan, karena mencerminkan pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, baik secara sementara maupun permanen. Mobilitas ini memberikan gambaran tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah, daya tarik wilayah tertentu, serta potensi tekanan atau peluang sosial ekonomi di daerah tujuan maupun asal. Mobilitas menggambarkan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Menurut ilmu sosiologi, mobilitas terbagi menjadi mobilitas vertikal dan horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan atau perubahan status sosial, misalnya perubahan status seseorang dari miskin menjadi kaya. Mobilitas horizontal adalah perpindahan penduduk secara geografis. Mobilitas horizontal disebut juga dengan migrasi.

4.3.1 Migrasi Masuk

Migrasi masuk adalah angka yang menunjukkan banyaknya yang masuk per 1.000 penduduk di suatu kabupaten/kota tujuan dalam waktu yang sama. Migrasi masuk adalah jumlah penduduk yang berpindah ke suatu wilayah dari wilayah lain dengan tujuan menetap. Tingginya angka migrasi masuk biasanya mengindikasikan daya tarik suatu wilayah, baik karena faktor ekonomi, pendidikan, maupun sosial.

Daerah dengan fasilitas publik yang baik, lapangan kerja yang tersedia, serta kualitas hidup yang lebih tinggi cenderung menjadi tujuan migrasi masuk.

Tabel 4-39 Migrasi Masuk

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK SEMESTER I 2025	MIGRASI MASUK	ANGKA MIGRASI MASUK
1	HARUYAN	22.632	453	20,02
2	BATU BENAWA	20.883	387	18,53
3	LABUAN AMAS SELATAN	30.642	603	19,68
4	LABUAN AMAS UTARA	29.166	568	19,47
5	PANDAWAN	36.194	747	20,64
6	BARABAI	56.329	1.573	27,93
7	BATANG ALAI SELATAN	24.673	495	20,06
8	BATANG ALAI UTARA	19.374	423	21,83
9	HANTAKAN	13.292	198	14,90
10	BATANG ALAI TIMUR	7.524	94	12,49
11	LIMPASU	11.431	218	19,07
	HULU SUNGAI TENGAH	272.140	5.759	21,16

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025.

Pada Tabel 4-39 penduduk yang datang/masuk ke kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 sebanyak: 5.759 jiwa, sementara jumlah penduduk pertengahan tahun 272.140 Jiwa. Dari data tersebut maka Angka Migrasi Masuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 adalah : 21,16 yang artinya terjadi kedatangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk 1.000 penduduk sebanyak 21 jiwa. Jumlah Angka Migrasi Masuk terbanyak pada kecamatan Barabai adalah 27,93 artinya untuk 1.000 penduduk sebanyak 28 jiwa, sedangkan terendah pada kecamatan Batang Alai Timur adalah 12,49 artinya untuk 1.000 penduduk sebanyak 12 jiwa.

4.3.2 Migrasi Keluar

Migrasi keluar adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1.000 penduduk di suatu kabupaten/kota tujuan dalam waktu yang sama. Migrasi keluar adalah jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah asalnya untuk menetap di wilayah lain. Fenomena ini sering terjadi karena keterbatasan lapangan pekerjaan, fasilitas pendidikan yang terbatas, atau faktor lingkungan dan sosial yang

kurang mendukung. Angka migrasi keluar yang tinggi dapat menjadi sinyal perlunya perbaikan kualitas hidup di daerah asal.

Tabel 4-40 Migrasi Keluar

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK SEMESTER I 2025	MIGRASI KELUAR	ANGKA MIGRASI KELUAR
1	HARUYAN	22.632	743	32,83
2	BATU BENAWA	20.883	633	30,31
3	LABUAN AMAS SELATAN	30.642	986	32,18
4	LABUAN AMAS UTARA	29.166	889	30,48
5	PANDAWAN	36.194	1250	34,54
6	BARABAI	56.329	2.314	41,08
7	BATANG ALAI SELATAN	24.673	776	31,45
8	BATANG ALAI UTARA	19.374	653	33,70
9	HANTAKAN	13.292	366	27,54
10	BATANG ALAI TIMUR	7.524	273	36,28
11	LIMPASU	11.431	370	32,37
	HULU SUNGAI TENGAH	272.140	9.253	34,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025.

Pada Tabel 4-40 maka Angka Migrasi Keluar Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 adalah 34,00 yang artinya terjadi perpindahan keluar Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk 1.000 penduduk sebanyak 34 jiwa.

4.3.3 Migrasi Netto

Angka Migrasi Netto (*nett migration/Mn*) merupakan selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Apabila jumlah migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar, maka disebut migrasi neto positif, yang berarti wilayah tersebut mengalami penambahan penduduk akibat perpindahan masuk. Sebaliknya, jika jumlah migrasi keluar lebih besar dibandingkan migrasi masuk, maka disebut migrasi neto negatif, yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut mengalami pengurangan jumlah penduduk karena lebih banyak orang yang pindah keluar daripada yang datang. Angka migrasi neto ini penting untuk memahami dinamika kependudukan suatu daerah, terutama dalam perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Pada Tabel 4-41 dibawah, maka migrasi netto di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 adalah : -12,84 yang artinya terjadi perpindahan keluar lebih banyak daripada yang datang masuk ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebesar 13 jiwa, hal ini bisa jadi disebabkan banyak penduduk Hulu Sungai Tengah melanjutkan studi/sekolah di jenjang perguruan tinggi di luar daerah atau mencari pekerjaan di daerah lain.

Tabel 4-41 Migrasi Netto

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK SEMESTER I 2025	MIGRASI MASUK	MIGRASI KELUAR	ANGKA MIGRASI NETTO
1	HARUYAN	22.632	453	743	-12,81
2	BATU BENAWA	20.883	387	633	-11,78
3	LABUAN AMAS SELATAN	30.642	603	986	-12,50
4	LABUAN AMAS UTARA	29.166	568	889	-11,01
5	PANDAWAN	36.194	747	1250	-13,90
6	BARABAI	56.329	1.573	2.314	-13,15
7	BATANG ALAI SELATAN	24.673	495	776	-11,39
8	BATANG ALAI UTARA	19.374	423	653	-11,87
9	HANTAKAN	13.292	198	366	-12,64
10	BATANG ALAI TIMUR	7.524	94	273	-23,79
11	LIMPASU	11.431	218	370	-13,30
HULU SUNGAI TENGAH		272.140	5.759	9.253	-12,84

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025.

4.3.4 Persentase Penduduk Kota

Persentase penduduk kota menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dibandingkan dengan total penduduk. Angka ini mencerminkan perubahan struktur demografis Indonesia yang semakin urban. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dimaksud kota adalah Kota Barabai yang terdiri dari Kelurahan Barabai Darat, Barabai Utara, Barabai Selatan, Barabai Barat, Barabai Timur dan Bukat yang memiliki jumlah penduduk 25.008 jiwa dan jumlah seluruh penduduk kota dan desa sebanyak 272.954 artinya persentase penduduk kota sebesar 9,16%.

Tabel 4-42 Jumlah Penduduk Kota

NO	KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BARABAI DARAT	4.244	4.254	8.498
2	BARABAI TIMUR	1.963	2.117	4.080
3	BARABAI SELATAN	814	797	1.611
4	BARABAI UTARA	2.152	2.282	4.434
5	BARABAI BARAT	1.434	1.583	3.017
6	BUKAT	1.653	1.715	3.368
TOTAL PENDUDUK KOTA		12.260	12.748	25.008

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025

4.3.5 Rasio Penduduk Kota dan Desa

Rasio penduduk kota dan desa menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dengan yang tinggal di wilayah perdesaan. Rasio ini penting untuk memahami distribusi penduduk dan arah kebijakan pembangunan wilayah. Misalnya, jika rasio menunjukkan dominasi penduduk kota, maka perlu adanya perhatian terhadap tata kelola kota, penyediaan hunian, dan transportasi publik.

Tabel 4-43 Rasio Penduduk Kota dan Desa

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK KOTA	JUMLAH PENDUDUK DESA	RASIO KOTA DAN DESA
HULU SUNGAI TENGAH	25.008	247.946	0,10

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025.

Pada Tabel 4-43 jumlah penduduk kota 25.008 jiwa dan jumlah penduduk desa 247.946 jiwa maka rasio kota dan desa : 0,10. Rasio ini mencerminkan bahwa urbanisasi belum merata, dan sebagian besar masyarakat masih memilih untuk tinggal di wilayah pedesaan, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun kultural. Namun demikian, angka rasio tersebut juga menandakan adanya potensi pergeseran populasi ke wilayah perkotaan di masa depan, seiring dengan pertumbuhan infrastruktur, perluasan kawasan urban, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses yang lebih mudah terhadap layanan publik, pendidikan, dan lapangan kerja. Melalui analisis rasio ini, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan pembangunan yang lebih seimbang antara kota dan desa, agar pemerataan pembangunan tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan, tetapi juga menyentuh masyarakat pedesaan secara langsung.

BAB V

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan melalui proses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipi. Sebagai instrumen utama dalam administrasi negara, dokumen kependudukan memegang peran penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak sipil setiap warga negara. Tanpa keberadaan dokumen yang sah, individu akan menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta dalam mengurus berbagai keperluan hukum dan administratif lainnya. Oleh karena itu, tingkat cakupan kepemilikan dokumen kependudukan menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di suatu daerah.

5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) merupakan dokumen identitas resmi yang mencatat data lengkap tentang anggota suatu keluarga. Di dalamnya tercantum informasi penting seperti nama, nomor induk kependudukan (NIK), susunan dan hubungan antar anggota keluarga, tempat dan tanggal lahir, serta status pernikahan dan pekerjaan. Kegunaan Kartu Keluarga sangat vital dalam berbagai aspek kehidupan. Kartu Keluarga menjadi dasar utama dalam pengurusan administrasi kependudukan lainnya, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, hingga akta kematian. Selain itu, Kartu Keluarga juga digunakan sebagai syarat dalam mengakses layanan publik, seperti mendaftar sekolah, memperoleh bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga mengurus dokumen legal lainnya seperti paspor dan NPWP. Tak hanya itu, Kartu Keluarga juga berfungsi sebagai alat verifikasi hubungan keluarga dalam konteks hukum, pewarisan, maupun perwalian anak. Oleh karena itu, memiliki Kartu Keluarga yang valid dan selalu diperbarui merupakan bagian penting dari tanggung jawab administrasi setiap warga negara. Berdasarkan data pada tabel 5-1 di bawah, jumlah kepala keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercatat sebanyak 99.572 kepala keluarga. Dari jumlah

tersebut, sebanyak 99.130 kepala keluarga atau 99,56 % telah memiliki dokumen kependudukan.

Tabel 5-1 Kepemilikan Kartu Keluarga

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK			KEPEMILIKAN KK			PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
		L	P	L + P	L	P	L + P	
1	HARUYAN	6.177	2.290	8.467	6.153	2.270	8.423	99,48
2	BATU BENAWA	5.687	2.014	7.701	5.664	2.005	7.669	99,58
3	LABUAN AMAS SELATAN	8.348	2.960	11.308	8.331	2.939	11.270	99,66
4	LABUAN AMAS UTARA	8.201	2.698	10.899	8.178	2.669	10.847	99,52
5	PANDAWAN	9.815	3.162	12.977	9.773	3.144	12.917	99,54
6	BARABAI	15.158	4.971	20.129	15.121	4.932	20.053	99,62
7	BATANG ALAI SELATAN	6.838	2.539	9.377	6.800	2.523	9.323	99,42
8	BATANG ALAI UTARA	5.218	1.908	7.126	5.194	1.891	7.085	99,42
9	HANTAKAN	3.588	1.170	4.758	3.574	1.164	4.738	99,58
10	BATANG ALAI TIMUR	2.026	659	2.685	2.018	656	2.674	99,59
11	LIMPASU	3.184	961	4.145	3.176	955	4.131	99,66
HULU SUNGAI TENGAH		74.240	25.332	99.572	73.982	25.148	99.130	99,56

Catatan. L = Laki-laki, P = Perempuan.

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025.

5.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan identitas resmi bagi setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah. KTP-el dilengkapi dengan cip yang berisi data biometrik, seperti sidik jari dan data kependudukan lainnya, sehingga memiliki tingkat keamanan dan keakuratan data yang tinggi. Kegunaan KTP-el sangat luas dan krusial dalam kehidupan sehari-hari. Dokumen ini menjadi alat bukti identitas diri yang sah untuk keperluan administratif, seperti membuka rekening bank, membuat SIM, mengurus paspor, menikah, hingga dalam proses rekrutmen kerja. Selain itu, KTP-el juga menjadi persyaratan utama untuk mendapatkan pelayanan publik, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta hak-hak politik seperti pemilu. Karena sistemnya sudah terintegrasi secara nasional, KTP-el memudahkan pendataan dan pelayanan lintas daerah. Penduduk tidak perlu lagi membuat KTP baru saat berpindah domisili, cukup dengan memperbarui data yang ada. Hal ini mendukung terciptanya system administrasi kependudukan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan

kata lain, KTP-el bukan hanya sekadar kartu identitas, melainkan kunci utama dalam menjamin akses warga terhadap berbagai layanan dan hak-hak dasar sebagai warga negara. Berdasarkan data pada tabel 5-2 di bawah ini, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencatat jumlah penduduk sebanyak 272.954 jiwa, dengan 203.389 jiwa di antaranya merupakan penduduk wajib KTP, yaitu mereka yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 198.990 jiwa telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), atau setara dengan 97,84%. Angka ini menunjukkan tingkat kepemilikan dokumen identitas yang sangat tinggi dan mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam menjamin hak identitas penduduk.

Tabel 5-2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

NO	KECAMATAN	WAJIB KTP	Memiliki KTP Elektronik	Belum Memiliki KTP Elektronik	Persentase Kepemilikan (%)
1	HARUYAN	16.885	16.523	362	97,86
2	BATU BENAWA	15.789	15.463	326	97,94
3	LABUAN AMAS SELATAN	22.976	22.499	477	97,92
4	LABUAN AMAS UTARA	21.860	21.317	543	97,52
5	PANDAWAN	26.948	26.465	483	98,21
6	BARABAI	42.113	41.427	686	98,37
7	BATANG ALAI SELATAN	18.735	18.399	336	98,21
8	BATANG ALAI UTARA	14.474	14.104	370	97,44
9	HANTAKAN	9.636	9.300	336	96,51
10	BATANG ALAI TIMUR	5.496	5.216	280	94,91
11	LIMPASU	8.477	8.277	200	97,64
HULU SUNGAI TENGAH		203.389	198.990	4.399	97,84

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025.

5.3 Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Anak sebagai bagian dari warga negara berhak memiliki identitas yang diwujudkan dalam bentuk Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan dokumen identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk anak warga negara Indonesia yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah. Tujuan dari penerbitan KIA adalah untuk melindungi hak anak, mempermudah akses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendukung pendataan dan perencanaan pembangunan yang berbasis data

kependudukan. Pada tahun 2025, jumlah anak yang telah memiliki KIA mencapai 67,44% dari total anak berusia 0–17 tahun.

Tabel 5-3 Kepemilikan Kartu Identitas Anak

NO	KECAMATAN	WAJIB KIA	MEMILIKI KIA	BELUM MEMILIKI KIA	Persentase Kepemilikan (%)
1	HARUYAN	5.733	3.919	1.814	68,36
2	BATU BENAWA	5.091	3.513	1.578	69,00
3	LABUAN AMAS SELATAN	7.710	4.810	2.900	62,39
4	LABUAN AMAS UTARA	7.346	4.328	3.018	58,92
5	PANDAWAN	9.264	6.687	2.577	72,18
6	BARABAI	14.345	10.467	3.878	72,97
7	BATANG ALAI SELATAN	5.982	4.024	1.958	67,27
8	BATANG ALAI UTARA	4.898	3.311	1.587	67,60
9	HANTAKAN	3.662	2.454	1.208	67,01
10	BATANG ALAI TIMUR	1.995	1.210	785	60,65
11	LIMPASU	2.937	1.788	1.149	60,88
HULU SUNGAI TENGAH		68.963	46.511	22.452	67,44

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025.

5.4 Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan identitas awal sekaligus bukti legal yang menunjukkan bahwa seseorang adalah bagian dari warga negara Indonesia. Selain itu, akta kelahiran merupakan bukti sah dan legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang mencatat kelahiran seseorang, dan merupakan dasar utama untuk memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen kependudukan lainnya, seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el di masa mendatang. Kepemilikan akta kelahiran memberikan identitas hukum pertama bagi seorang anak, sekaligus menjadi syarat dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, hingga perlindungan hukum anak. Akta ini wajib dicatatkan paling lambat 60 hari setelah kelahiran (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006). Pada tahun 2025, jumlah anak yang telah memiliki Akta Kelahiran mencapai 99,98% dari total anak berusia 0–17 tahun.

Tabel 5-4 Kepemilikan Akta Kelahiran

NO	KECAMATAN	Jumlah Usia 0-17 tahun	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran	Belum Memiliki Akta Kelahiran	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (%)
1	HARUYAN	6.066	6.064	2	99,97
2	BATU BENAWA	5.444	5.441	3	99,94
3	LABUAN AMAS SELATAN	8.206	8.205	1	99,99
4	LABUAN AMAS UTARA	7.771	7.770	1	99,99
5	PANDAWAN	9.894	9.893	1	99,99
6	BARABAI	15.335	15.331	4	99,97
7	BATANG ALAI SELATAN	6.364	6.364	0	100,00
8	BATANG ALAI UTARA	5.222	5.222	0	100,00
9	HANTAKAN	3.913	3.912	1	99,97
10	BATANG ALAI TIMUR	2.130	2.130	0	100,00
11	LIMPASU	3.122	3.120	2	99,94
HULU SUNGAI TENGAH		73.467	73.452	15	99,98

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025.

5.5 Kepemilikan Akta Perkawinan

Akta perkawinan adalah bukti sah terjadinya pernikahan yang dicatatkan oleh negara, baik bagi warga negara Indonesia yang menikah menurut agama non-Islam maupun bagi yang menikah secara adat. Akta ini berfungsi sebagai dasar hukum status perkawinan, pengurusan hak waris, tanggung jawab hukum suami-istri, serta keabsahan anak dalam perkawinan. Akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kepada penduduk non muslim, sedangkan penduduk muslim menggunakan buku nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti legal perkawinan mereka. Kepemilikan akta perkawinan yang dihitung adalah akta perkawinan yang dicatatkan dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan tabel 5-5 di bawah ini, data kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dari total 126.005 penduduk yang berstatus kawin dan berusia di atas 19 tahun (kategori "Wajib Akta Kawin"), sebanyak 79.786 jiwa atau 63,32% yang telah memiliki akta perkawinan. Sementara itu, sebanyak 46.219 jiwa atau 36,68% lainnya belum memiliki dokumen tersebut.

Tabel 5-5 Kepemilikan Akta Perkawinan

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Kawin	Memiliki Akta Kawin/Buku Nikah	Belum Memiliki Akta Kawin/Buku Nikah	Persentase Kepemilikan (%)
1	HARUYAN	10.465	5.835	4.630	55,76
2	BATU BENAWA	9.664	6.792	2.872	70,28
3	LABUAN AMAS SELATAN	14.445	8.442	6.003	58,44
4	LABUAN AMAS UTARA	14.128	7.971	6.157	56,42
5	PANDAWAN	16.528	11.784	4.744	71,30
6	BARABAI	25.549	18.463	7.086	72,27
7	BATANG ALAI SELATAN	11.468	6.611	4.857	57,65
8	BATANG ALAI UTARA	8.835	5.825	3.010	65,93
9	HANTAKAN	6.063	2.856	3.207	47,11
10	BATANG ALAI TIMUR	3.412	1.461	1.951	42,82
11	LIMPASU	5.448	3.746	1.702	68,76
HULU SUNGAI TENGAH		126.005	79.786	46.219	63,32

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025.

5.6 Kepemilikan Akta Perceraian

Kepemilikan akta cerai adalah status hukum seseorang yang secara sah memiliki dokumen resmi berupa akta cerai yang diterbitkan oleh lembaga berwenang, seperti Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, setelah perceraian diputuskan secara hukum. Akta cerai berfungsi sebagai bukti otentik bahwa ikatan pernikahan telah berakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kepemilikan akta cerai penting untuk berbagai keperluan administrasi, seperti pengurusan perubahan status pada kartu identitas, kartu keluarga, atau dokumen perjalanan, serta menjadi dasar dalam pengaturan hak asuh anak, pembagian harta bersama, hak waris, dan pernikahan kembali. Dengan demikian, akta cerai tidak hanya berperan sebagai bukti formal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak hukum bagi pihak-pihak yang bercerai. Berdasarkan data tabel 5-6 di bawah ini, kepemilikan akta cerai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercatat dari 8.582 orang yang wajib memiliki akta cerai, sebanyak 4.460 orang atau 51,97% telah memiliki akta cerai, sementara sisanya, yaitu 4.122 orang atau 48,03%, belum memiliki akta cerai tersebut. Adapun yang dimaksud dengan wajib akta cerai adalah penduduk dengan status perkawinan "cerai" dan berusia di atas 19 tahun. Dengan kata lain, mereka yang

telah bercerai secara hukum dan telah mencapai usia dewasa menurut ketentuan perundang-undangan, wajib memiliki akta cerai sebagai bukti sah perceraian.

Tabel 5-6 Kepemilikan Akta Perceraian

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Cerai	Memiliki Akta Cerai	Belum Memiliki Akta Cerai	Persentase Kepemilikan (%)
1	HARUYAN	742	352	390	47,44
2	BATU BENAWA	666	341	325	51,20
3	LABUAN AMAS SELATAN	1.008	419	589	41,57
4	LABUAN AMAS UTARA	801	385	416	48,06
5	PANDAWAN	1.143	652	491	57,04
6	BARABAI	1.906	1.177	729	61,75
7	BATANG ALAI SELATAN	889	395	494	44,43
8	BATANG ALAI UTARA	655	366	289	55,88
9	HANTAKAN	342	180	162	52,63
10	BATANG ALAI TIMUR	151	56	95	37,09
11	LIMPASU	279	137	142	49,10
HULU SUNGAI TENGAH		8.582	4.460	4.122	51,97

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025.

5.7 Kepemilikan Akta Kematian

Akta kematian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagai bukti sah terjadinya kematian seseorang, yang memuat data penting seperti nama, tanggal, dan penyebab kematian. Fungsi utama akta kematian adalah sebagai bukti legal untuk mengurus administrasi kependudukan, menghapus nama almarhum dari daftar penduduk, serta menjadi syarat penting dalam pengurusan hak warisan, klaim asuransi, santunan kematian, dan berbagai keperluan hukum lainnya yang terkait dengan status kematian seseorang. Berdasarkan data tabel 5-7 dibawah dari 21.188 kematian atau orang meninggal yang telah dilaporkan ke pihak dukcapil maka semuanya atau 100% telah dibuatkan atau memiliki akta kematian.

Tabel 5-7 Kepemilikan Akta Kematian

NO	KECAMATAN	JUMLAH MENINGGAL			MEMILIKI AKTA KEMATIAN			%
		LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	
1	HARUYAN	917	743	1.660	917	743	1.660	100
2	BATU BENAWA	983	867	1.850	983	867	1.850	100
3	LABUAN AMAS SELATAN	982	776	1.758	982	776	1.758	100

Tabel 5-7 Lanjutan

NO	KECAMATAN	JUMLAH MENINGGAL			MEMILIKI AKTA KEMATIAN			%
		LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	
4	LABUAN AMAS UTARA	1.185	1009	2.194	1.185	1009	2.194	100
5	PANDAWAN	1.519	1.237	2.756	1.519	1.237	2.756	100
6	BARABAI	2.722	2.299	5.021	2.722	2.299	5.021	100
7	BATANG ALAI SELATAN	1.156	1047	2.203	1.156	1047	2.203	100
8	BATANG ALAI UTARA	733	637	1.370	733	637	1.370	100
9	HANTAKAN	480	398	878	480	398	878	100
10	BATANG ALAI TIMUR	244	194	438	244	194	438	100
11	LIMPASU	553	507	1060	553	507	1060	100
HULU SUNGAI TENGAH		11.474	9.714	21.188	11.474	9.714	21.188	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025 (Aplikasi PDAK).

5.8 Jumlah Aktivasi IKD

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah KTP-el versi digital yang tersimpan aman dalam smartphone, berfungsi sebagai representasi dokumen kependudukan resmi. IKD mempermudah layanan publik tanpa perlu fotokopi KTP fisik, mencakup data pribadi, keluarga, serta dokumen seperti KK dan biodata. Aplikasi ini disahkan oleh Dukcapil dan memiliki sistem keamanan tinggi, termasuk fitur anti-tangkap layar. Aktivasi IKD memerlukan kehadiran pemohon di kantor Dukcapil atau layanan jemput bola, tidak bisa dilakukan mandiri secara total untuk memastikan keamanan. Syaratnya meliputi memiliki smartphone, e-KTP fisik, email, dan nomor HP aktif. IKD bukan menggantikan, melainkan melengkapi KTP-el fisik, keduanya berlaku berdampingan. IKD memberikan kemudahan akses, sementara KTP-el tetap menjadi dokumen dasar. IKD memudahkan pelayanan publik tanpa perlu membawa fisik KTP, memuat data KK, BPJS, NPWP, dan lainnya, serta dijamin keamanannya dengan fitur *face recognition* dan PIN. Berdasarkan data tabel 5-8 dibawah dari target IKD sebanyak 198.937 orang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, baru 4,91% atau 9.760 orang yang telah melakukan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital dimaksud.

Tabel 5-8 Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

NO	KECAMATAN	TARGET IKD	AKTIVASI IKD	PERSENTASE (%)
1	HARUYAN	16.533	554	3,35
2	BATU BENAWA	15.482	747	4,82
3	LABUAN AMAS SELATAN	22.406	833	3,72
4	LABUAN AMAS UTARA	21.350	658	3,08
5	PANDAWAN	26.500	1.344	5,07
6	BARABAI	41.402	3.541	8,55
7	BATANG ALAI SELATAN	18.393	938	5,10
8	BATANG ALAI UTARA	14.098	476	3,38
9	HANTAKAN	9.305	230	2,47
10	BATANG ALAI TIMUR	5.215	179	3,43
11	LIMPASU	8.253	260	3,15
HULU SUNGAI TENGAH		198.937	9.760	4,91

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri semester II 2025 (Aplikasi PDAK)

BAB VI PENUTUP

Data Kependudukan yang ditampilkan di Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 ini menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terkonsolidasi sehingga dapat membantu Pemerintah Kabupaten Sungai Tengah dalam mengambil kebijakan pembangunan. Dari gambaran yang ditampilkan dapat dijadikan rujukan untuk menyusun kebijakan daerah dan kegiatan pembangunan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini disajikan secara berkala setiap tahunnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi ke depan tentang penduduk dan permasalahan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah gambaran atau kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025, jumlah penduduk tercatat sebanyak 272.954 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 137.510 atau 50,38% dan perempuan sebanyak 135.444 atau 49,62%. Jika ditinjau dari struktur umur, penduduk dikelompokkan menjadi:

- Usia muda (0–14 tahun): 60.400 jiwa atau 22,13% dari total penduduk.
- Usia produktif (15–64 tahun): 191.664 jiwa atau 70,22% dari total penduduk.
- Usia Tua (65 tahun ke atas): 20.890 jiwa atau 7,65% dari total penduduk.

Dominasi kelompok usia produktif menandakan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sedang memasuki bonus demografi, yaitu kondisi di mana proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif. Bonus demografi adalah peluang untuk mencapai kemakmuran ekonomi, tetapi peluang ini tidak akan otomatis menjadi dividen ekonomi jika tidak diikuti dengan kebijakan terpadu di sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pembangunan keluarga.

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini diharap dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh instansi Pemerintah/swasta maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi untuk menentukan kebijakan atau kegiatan lainnya. Kami menyadari bahwa buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran untuk perbaikan profil kependudukan mendatang, baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan, sangat kami harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan.
2. Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan.
3. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam KTP el.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.
7. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat.
8. Data Konsolidasi Bersih Ditjen. Dukcapil Kemendagri tahun 2025 Semester II.
9. Aplikasi PDAK Ditjen. Dukcapil Kemendagri.



#HST
Menyala



PROFESIONAL
RESPONSIF
INOVATIF
MELAYANI
AKUNTABEL

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 2025

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Profil ini membantu merumuskan kebijakan yang tepat, memantau dampak kependudukan terhadap lingkungan, dan meningkatkan pelayanan publik berbasis data yang terintegrasi (Satu Data Kependudukan).

Secara rinci, tujuan dari penyusunan profil perkembangan kependudukan meliputi:

- Menggambarkan Kondisi Kependudukan: Menyediakan gambaran riil mengenai jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk.
- Dasar Perencanaan Pembangunan: Menjadi basis data dalam merencanakan program sosial, ekonomi, dan pembangunan nasional/wilayah.
- Monitoring dan Evaluasi: Memantau tren perkembangan penduduk dan perubahannya dari waktu ke waktu.
- Peningkatan Pelayanan Publik: Memudahkan akses dan efisiensi dalam pelayanan publik, seperti bantuan sosial, pendidikan, dan dokumen kependudukan.
- Peningkatan Kualitas Penduduk: Menjadi tolok ukur dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kualitas sumber daya manusia.



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



disdukcapil.hstkab.go.id



Disdukcapil Hulu Sungai Tengah



[dukcapil_hst](https://www.instagram.com/dukcapil_hst)



DUKCAPIL HST



[dukcapilhst](https://www.tiktok.com/@dukcapilhst)

DUKCAPIL

HST GO
DIGITAL

#dukcapilprima